



komi  
pemilihan  
umu  
Sulawesi Utara

# Mengapa Harus Memilih ?

Partisipasi Masyarakat **Sulut**  
Saat **Pilkada** di Tengah Pandemi

Iverdixon Tinungki, Yoseph Ikanubun, Supardi Bado, Ady Putong

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

#### **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

##### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

##### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Mengapa Harus Memilih ?

Partisipasi Masyarakat **Sulut**  
Saat **Pilkada** di Tengah Pandemi

## **Pengarah :**

Ardiles M.R. Mewoh;  
Yessy Y. Momongan;  
Lanny A. Ointu;  
Salman Saelangi;  
Meidy Y. Tinangon;  
Pujiastuti.

## **Penulis/Penyusun :**

Iverdixon Tinungki;  
Yoseph E. Ikanubun;  
Supardi Bado;  
Ady Putong.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



# Mengapa Harus Memilih ?

Partisipasi Masyarakat **Sulut** Saat **Pilkada** di Tengah Pandemi

**Editor :**

Salman Saelangi, Verrianto Madjowa, Agustinus Hari,  
Rudy Lalonsang, Juita Purnamasari

**Desain Sampul dan Isi :**

E Paendong

**Ukuran :**

14 X 20 cm

**ISBN :**

978-623-6183-16-8

**Cetakan :**

2021

*Copyright © 2021 by*  
KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
*All Right Reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Penerbit**



**KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur,  
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

Website: [www.sulut.kpu.go.id](http://www.sulut.kpu.go.id)



## Kata Pengantar



**P**ada saat menulis kata pengantar buku ini, saya sementara mengikuti Rakor Evaluasi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Saya mendengar dengan saksama pengarahan yang disampaikan oleh Arif Budiman, pimpinan KPU RI.

Beliau menyampaikan bahwa pemilu atau pemilihan bagaikan melepas busur panah, begitu dilepas, maka busur panah itu tidak bisa ditarik lagi, dan busur panah itu akan terus bergerak menuju pada titik yang di arahkan.

Keputusan bahwa pemilihan kepala daerah serentak yang terhenti oleh karena pandemi Covid-19 dilanjutkan dan pelaksanaannya dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dan KPU menyatakan kesiapannya sementara pandemi masih berlangsung. Keputusan ini tidak bisa ditarik lagi. Seluruh jajaran KPU harus siap melaksanakannya.

Tetap bekerja di saat pandemi berlangsung menjadi kekuatiran bagi banyak orang. Maklum, karena tentu potensi semakin tinggi untuk terinfeksi ketika seseorang tetap beraktivitas dan melakukan pertemuan dengan banyak orang.



Belum lagi jika kekuatiran itu diperluas terhadap keluarganya yang hanya di rumah saja namun potensi terinfeksi tetap ada karena justru kitalah pembawa virus di rumah.

Namun demikian, busur sudah dilepas, anak panah harus menuju ke titiknya, pemilihan serentak harus terlaksana tanggal 9 Desember 2020, penyelenggara pemilihan harus memastikan semua persiapan berjalan, dan pemilihan terlaksana, senyampang keselamatan masyarakat tetap terjaga.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah kali pertama dalam sejarah kepemiluan berlangsung di Indonesia yang diselenggarakan di masa pandemi. Semua pemangku kepentingan sama sekali belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan pada situasi itu. Regulasi, sumber daya, teknis penyelenggaraan, sampai aspek yang bersifat non teknis semuanya harus diadaptasi dengan kondisi pandemi.

*Electoral Engineering* memang terus dilakukan oleh para ahli kepemiluan dalam rangka mewujudkan pemilu yang lebih baik dari waktu ke waktu, namun tidak satupun ahli berpikir merekayasa teknis pemilu yang diselenggarakan dalam kondisi bencana non alam seperti misalnya pandemi Covid-19.

Satu hal yang paling menjadi tantangan adalah partisipasi masyarakat, yang masih menjadi ukuran utama kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat antara lain dibuktikan dengan banyaknya jumlah pemilih yang datang di TPS pada waktu pemungutan suara, sehingga dalam setiap perhelatan demokrasi, semua pihak, terutama penyelenggara berjibaku melakukan program kegiatan mengajak masyarakat datang ke TPS.



Sementara di sisi yang lain dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 harus diterapkan protokol kesehatan antara lain jaga jarak dan menghindari tempat keramaian.

Tentu menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilihan untuk meyakinkan pemilih tetap datang ke TPS. Maka dalam hal ini sosialisasi yang masif dengan strategi yang tepat harus dijadikan ramuan yang manjur dari penyelenggara pemilihan.

Untunglah Sulawesi Utara memiliki akar sejarah yang panjang dalam berdemokrasi. Berdemokrasi bagi masyarakat Sulut tidak hanya sekadar menunaikan haknya, tapi berdemokrasi bagi masyarakat Sulut telah menjadi panggilan nurani. Buku ini mengulasnya dengan begitu mendasar akar demokrasi di Sulut yang membentuk kesadaran nurani untuk berdemokrasi.

Maka dari itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan gagah berani memantapkan tagline pilkadanya ialah **“Gerbang Demokrasi Indonesia”**. Dalam kalimat para frase tagline ini mengandung arti bahwa Sulawesi Utara adalah tempat di mana mulai berkecambahnya demokrasi di Indonesia.

Sebuah klaim yang sangat optimis. Namun rumusan tagline tersebut tidak datang bagaikan mimpi di siang bolong. Rumusan ini dibentuk berdasarkan lintasan sejarah berdemokrasi di Sulawesi Utara, yang digali oleh para ahli dalam sebuah seminar nasional pada awal sebelum tahapan diluncurkan.

Alhasil, tagline ini telah menghadirkan nuansa sepanjang perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tujuh daerah.



Nuansa ini begitu tergambaran mulai dari awal sampai berakhirnya tahapan pemilihan. Merasa bahwa Sulawesi Utara sebagai gerbang Demokrasi Indonesia sehingga seharusnya menjadi “*rule model*” penyelenggaraan pemilihan yang berlangsung, menjadi tekad semua pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggaranya, pesertanya, maupun pemilih itu sendiri.

Bagi penyelenggaranya, motivasi untuk mengukir berbagai prestasi, menjaga integritas, memperkokoh kemandirian, dan membangun soliditas menjadi santapan setiap hari yang terus diinternalisasi secara berjenjang.

Bagi peserta, kerinduan semua pihak agar peserta pemilihan membangun citra yang positif dalam berdemokrasi, menjaga kontestasi agar tetap berbingkai kerukunan dan kedamaian, serta mendeklarasikan siap menang siap kalah yang dibuktikan dengan yang kalah memberi selamat kepada yang menang pun terwujud.

Bagi pemilih, mau datang ke TPS menggunakan hak pilihnya adalah pilihan yang sangat heroik untuk kepentingan yang besar di saat dunia mengalami pandemi. Buku ini mampu menunjukkan sisi Sulawesi Utara dalam berdemokrasi, baik akar sejarahnya serta koherensinya pada saat pemilihan berlangsung. Bahwa walaupun pandemi sementara berlangsung tidak sedikitpun menyurutkan paling kurang euforia demokrasi.

Bahkan tidak terbatas pada hal itu saja, Sulawesi Utara mampu mengukir goresan prestasi dalam berdemokrasi, melalui capaian-capaiannya pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Tingginya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, seakan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan telah membudaya dalam diri.





Di tengah ancaman virus Covid-19, oma, opa, om, tante, nyong, nona, yang punya hak pilih, mau datang ke TPS. 78,42 persen partisipasi memilih dalam pemilihan tahun 2020 adalah partisipasi masyarakat tertinggi selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihelat di Bumi Nyiur Melambai. Dan tidak hanya itu saja, angka partisipasi tersebut adalah angka tertinggi di antara 9 Provinsi yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jadi pertanyaan akhir adalah mengapa harus memilih? Ben Bland mengatakan bahwa *“In Indonesia, there is no compulsory voting but it’s national holiday to encourage high turnout, in what Indonesians sometimes call a festival of democracy”*.

Memang memilih bukan sebuah kewajiban di Indonesia, namun di hari pemungutan suara, ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga tidak berlebihan jika disebut sebagai iven demokrasi. Di Sulawesi Utara tidak sekedar iven demokrasi tapi sering disebut pesta rakyat, maka memilih bagi masyarakat Sulut ibarat sebuah pesta yang harus dirayakan, dan orang akan berbondong-bondong menghadirinya.

Selamat atas diterbitkannya buku ini, semoga menjadi referensi ke depan agar pemilu atau pemilihan kepala daerah akan lebih baik.

Ardiles M. R. Mewoh

Ketua KPU Provinsi Sulut



# Daftar Isi ....

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Bab 1 Akar Demokrasi di Sulut</b>	3
A Pemilu Minahasa 1951	10
B Pemilihan Kapitalau di Sangihe Talaud	14
C Pemilihan Sangadi di Bolaang Mongondow	19
D Otonomisasi Daerah dan Pilkada	23
<b>Bab 2 Selintas Pilkada di Sulut</b>	34
A Pemerintahan Daerah Sebelum Pemilihan Langsung	34
B Era Pemilihan Langsung	45
C Potret Pilkada Pertama di Sulut 2005	50
D Sulut Masa Pilkada Serentak	52
E Pilkada di Masa Pandemi Covid-19	57
<b>Bab 3 Pilkada di Era Covid-19</b>	64
A Badai Pandemi dari Wuhan	64
B Tantangan Menghantui Pilkada 2020	70
C Masyarakat yang Enggan ke TPS	77
<b>Bab 4 Pilkada di Era Covid-19</b>	91
A Langkah KPU Merayu Pemilih	94
B Hasil yang tak Terbayangkan	103
C Capaian Menakjubkan di 15 Kabupaten/ Kota	111
<b>Bab 5 Penutup</b>	121
<b>Daftar Pustaka</b> .....	129
<b>Tentang Penulis</b> .....	131







## AKAR DEMOKRASI DI SULAWESI UTARA

**K**etika dunia bergerak cepat menuju pemerintahan populis yang mengedepankan kedaulatan rakyat, demokrasi menjadi tuntutan yang tak mungkin tertampik dari arus perubahan yang mendorong demokratisasi pemerintahan lokal. Gelombang reformasi politik dan demokrasi di berbagai belahan dunia pun selalu berujung pada desentralisasi dan pemberdayaan pemerintahan lokal. Persoalannya, sebagaimana sejarahnya, demokrasi adalah sebuah proses yang rumit, tidak datang sekejap. Dia adalah social capital (kepercayaan mendasar) yang ditumbuhkan dari bawah, yaitu dari tingkat masyarakat lokal.

Ini sebabnya, Indonesia menoleh ke timur, bisa jadi sebuah metafora sejarah demokrasi electoral negeri ini, dan akarnya jauh terbancak sejak abad 11 di Sulawesi Utara (Sulut). Sebutlah Minahasa dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Minahasa adalah miniatur dari ibu kandung demokrasi Yunani di mata pendatang Eropa.

Saat memijak tanah Minahasa, mereka dikejutkan peran ‘Demos’ (rakyat) dan ‘Kratos’ (Pemerintahan) dalam sistem pengambilan keputusan di sepotong belahan bumi yang tak mereka sangka ini. Bangsa pendatang itu menyebut desa-desa di Minahasa sebagai doors republik.



“Dalam masa lampau Minahasa, segala kebijakan, keputusan selalu diambil bersama,” ungkap sejarawan Drs. Fendy Parengkuan, MA dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Minahasa Pionir Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia”.

Di benua Eropa sendiri, eksperimen-eksperimen demokrasi pascamonarki baru dimulai pada abad ke-18. Para cendekiawan Barat itu mulai mengutak-atik ikhtiar Yunani dan Romawi kuno menjadi pranata politik, dan dari sanalah baru transformasi demokrasi modern berjalan menuju abad-abad selanjutnya mencapai masa runtuhnya kekaisaran yang tersisa seusai perang dunia kedua.

Dalam definisinya yang paling sederhana, di tanah-tanah Minahasa, Sangihe Talaud dan Bolaang Mangondow, dapat ditelusuri jejak yang jelas kehadiran rakyat dalam sistem pemerintahan masa lampau. Dari perspektif antropologi historis, sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan serta tata kelola pemerintahan dapat ditelusuri pada perangkat-perangkat kerajaan yang pernah ada di Sulawesi Utara.

Kilau retihan sejarah demokrasi electoral ini tersimpan dalam dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut). Kutipan menariknya juga bisa diintip pada Boyd R. Compton “Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia” 1993, yang diterbitkan. Pustaka LP3ES yang menyentil peristiwa Pemilihan di Minahasa dan Yogyakarta sebagai eksperimen pertama demokrasi electoral di Indonesia pada 14 Juni 1951.



Bila bercermin pada jarak paling dekat yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulut yang dihelat pada 9 Desember 2020, dengan angka 79,84 persen, tingkat partisipasi pemilih itu tercatat sebagai rekor tertinggi pertama dari sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur (pilgub) di Indonesia. Bahkan, capaian Pilkada era Pandemi Covid-19 ini melampaui target tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5 persen.

Sementara di waktu yang sama, pada Pilkada Kabupaten Kota, tiga daerah di Sulut masuk peringkat tertinggi di Indonesia yaitu Kota Tomohon peringkat pertama dengan partisipasi pemilih sebesar 91,5 persen. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 92,8 persen. Bolaang Mongondow Selatan, (Bolsel) 93,2 persen. Capaian prestasi ini tegas memberi pengayaan bahkan memperkokoh sejarah positif proses demokrasi di Sulut sejak masa lampau.

Para pemandu demokrasi electoral di antaranya unsur KPU Kabupaten Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon bahkan kalangan Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini pernah menutur, di Minahasa karakter demokrasi telah bekecambah baik dalam struktur adat yang mempengaruhi struktur pemerintahan yang kemudian bermuara pada sistem demokrasi electoral yang dieksperimenkan pada 1951 lewat pemilihan langsung bagi 25 anggota DPRD Minahasa dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih mencapai 73 persen penduduk yang berhak memilih memberikan suara.

Ini sebabnya, sejarah demokrasi electoral di Indonesia disebut berawal dari negeri para Tonaas itu.



Sebelum membicarakan Minahasa sebagai magnet utama dalam sejarah demokrasi electoral di Indonesia, berperahu ke negeri kepulauan Sangihe Talaud juga menarik dilakukan. Di negeri yang telah dihuni manusia sejak zaman es pada 5000 - 7000 tahun lampau itu, kehadiran rakyat/khayak dalam sistem pemerintahan sudah berjejak dari masa yang juga cukup jauh.

Narasi sejarah negeri para raja ini menyebutkan, keterlibatan suara rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan telah berlaku pada masa pemerintahan Raja Dalero yang berkuasa di kerajaan Tabukan 1892-1898, juga dalam pembentukan Lembaga Dewan Adat, serta tradisi pemilihan langsung “Kapitalau” (Kepala Desa) dalam sistem Pemerintahan Kampung yang sudah melintasi kurun waktu yang panjang sebagai basis demokrasi dalam lingkup paling bawah.

Bila demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang membuka ruang kesetaraan rakyat dalam pengambilan keputusan, maka di Sangihe Talaud di era Dalero telah tersedia ruang dialogia antara rakyat dan raja, bahkan terbukanya ruang kritik atas kekuasaan baik lewat lembaga Dewan Adat maupun secara personal.

Di Kerajaan Siau masa pemerintahan Raja Winsulangi (1591-1639) telah terbentuk Komolang Bobatong Datu (Majelis Petinggi Kerajaan) yang disebutkan Sudirno Kaghoo dalam “Jejak Leluhur, Warisan Budaya di Pulau Siau, PT. Kanisius 2016” sebagai lembaga legislatif, atau lembaga yang menjadi representasi rakyat di masa itu yang terdiri dari utusan kampung atau Bahani Kampung.





Keputusan penting Kumolang Bobatong Datu yang berlangsung secara demokratis di era penjajahan Belanda yang dapat dicatat di antaranya pemilihan Jacob Ponto sebagai raja kerajaan Siau pada 1850, berkuasa hingga 1889.

Mengapa disebut demokratis? Sebab, pemilihan Jacob Ponto sebagai raja tidak mendapatkan intervensi pihak pemerintahan kolonial. Bahkan Belanda, menghargai tradisi demokratis kerajaan Siau karena dipandang relevan dengan sistem kerajaan di negerinya.

Menengok ke Bolaang Mangondow, kita dipertemukan dengan hakekat kesadaran demokrasi lewat salah satu sosiofact di negeri para Bogani tersebut. Disebutkan, saat Mokodoludut menjadi Punu' (raja) pada 1303, ia dianugerahi gelar Punu Gumolung oleh para Bogani. Pemberiaan gelar dalam masyarakat tradisi Bolaang Mangondow dipandang sebagai pengakuan sakral dari rakyat kepada sang pemegang pucuk pimpinan pemerintahan tertinggi yang direpresentasikan lewat para Bogani.

Posisi para Bogani ketika itu merupakan forum permusyawaratan dalam pengambilan keputusan pemberian gelar, ungkap arsip sejarah Bolaang Mangondow.

Sementara apabila desa dipandang sebagai embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan berbasis demokrasi, maka secara tradisional Di Bolaang Mangondow, kehadiran para "Sangadi" sebagai Kepala Desa yang aktivitas pemilihannya dipilih langsung oleh penduduk desa merupakan benih demokrasi dari rengkah sejarah negeri itu.

Kembali ke Minahasa. Tak lebih sepelempar batu dari Zero Point, persis di jantung kota Manado, masih nampak



sebuah artefak demokrasi masa lampau yaitu gedung Minahasaraad. DR. Sam Ratulangi, Gubernur Pertama Sulawesi Utara pernah berkantor di Gedung itu. Namun jauh sebelum kemerdekaan, Minahasaraad adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa. Minahasaraad terbentuk seiring penetapan Minahasa sebagai daerah otonom Hindia Belanda lewat Peraturan Dewan-Dewan Lokal (Locale Raden-Ordonnantie) Nomor 64 tahun 1919.

Minahasaraad merupakan Dewan Rakyat pertama di Indonesia. Di gedung itu pula berlangsung sejumlah sidang yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi modern yang menjembatani kesenjangan antara fitrah manusia dan cengkeraman otoritarianisme. Di sana diputuskan sejumlah kontrak sosial, perlindungan hak warga negara, dan mengatur terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara.

Minahasa sebagai daerah yang menjadi magnet utama demokrasi di Indonesia juga tercermin lewat kultur dan praktik demokrasi di tingkat desa. Para sejarawan yang lahir dan besar di bentangan lanskap bergunung-gunung dengan bentang tanah yang subur ini mengatakan, praktik demokrasi juga terlihat pada Pemilihan Ukung tu'a (kepala desa) yang dilaksanakan dalam pranata demokratis.

Lebih luas lagi, kita akan dipertemukan dengan forum tertinggi dalam struktur masyarakat Minahasa tempo dulu yang disebut Dewan Wali Pakasaan. Arsip KPU Minahasa mencatat, Minahasaraad yang anggota-anggotanya dipilih dalam sebuah Pemilu dan eksis sampai masa Indonesia merdeka adalah rombakan dari Dewan Wali Pakasaan di masa penjajahan Belanda.



Para pegiat Mawale Cultural Center dan komunitas Mapatik, bisa disebut kelompok intelektual terkini yang dengan gigih menelusri serta menggali artefak dan sosiofact demokrasi Minahasa masa lampau.

Studi mendalam mereka mencatat, sebagaimana pohon memiliki akar, keberhasilan Pilkada atau Pemilu di Sulawesi Utara dalam beberapa periode hingga masa kini berakar pada adanya fakta demokrasi elektoral itu sudah tertanam sangat jauh dan dalam pada benak manusia dan kultur sejarah Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya.

Kultur demokrasi itu juga membentuk kemandirian daerah ini dan bertransformasi ke segala aspek kehidupan lainnya. Dari rengkah sejarah itulah kecambah karakter demokrasi melesat hingga nampak saat ini. “Kita sudah mengenal sistem perwakilan dan musyawarah. Sistem ini sudah sejak lama dikenal di Minahasa, jauh sebelum orang Portugis dan Spanyol masuk ke Minahasa,” ujar DR Denni Pinontoan M.Teol, peneliti Mawale Cultural Center.

Ia mengatakan nilai-nilai demokrasi yang berakar di Minahasa sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di Minahasa.

Kendati tak mengenal kata demokrasi, masyarakat Minahasa sudah mengenal dan memberlakukan prinsip-prinsip demokrasi modern. Mereka sudah mengenal sistem perwakilan dan musyawarah, dan sistem ini sudah ada sebelum kapal-kapal Portugis dan Spanyol mendarat di Minahasa.



## A. PEMILU MINAHASA 1951

Sebuah afirmasi yang menarik pernah diungkapkan Husni Kamil Manik. Pada 27 Mei 2016, ketika memberi kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi Manado, mantan Ketua KPU RI tersebut dengan tegas menyebutkan demokrasi di Indonesia berawal dari Minahasa. Dalam tilikan Manik, sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Minahasa telah hidup dalam kultur, struktur dan praktik demokrasi.

Ini sebabnya, andaikata peta baring bangsa kepulauan Nusantara ini diingklinasi, maka Minahasa, Sulawesi Utara, tak lain merupakan titik berangkat mula-mula dari sejarah perkembangan demokrasi modern di Indonesia.

Pada uraian sebelumnya, telah tersentil ornament khas dalam penyelenggaraan pemerintahan tradisional di Minahasa yang kaya dengan nilai-nilai demokrasi dibuktikan dengan berbagai hasil penelitian empirik. Sebagaimana konsep penerapannya, demokrasi di sana diresepsikan sebagaimana tatanan hidup bernegara dan dipahami sebagai pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Rakyat berada pada posisi sebagai pemegang kedaulatan Negara.

Demikian Minahasa, dengan karakteristik unik demokrasi yang diperkaya kemelekan huruf penduduknya waktu itu, sontak menjadi titik masuk Minahasa sebagai pilot project Pemilihan Umum pertama tahun 1951 selain Jogjakarta. Setahun



kemudian yaitu pada 1952 pemilihan langsung di Makassar baru dilaksanakan. Namun sebelumnya, di masa Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dikenal sebagai negara federasi yang berdiri pada 27 Desember 1949, di Minahasa sudah pernah berlangsung pemilihan umum.

Maka adalah tak kurang menarik bila mencermati lintasan pergulatan politik dan demokrasi modern di tahun 1951 itu. Indonesia pun tak kekurangan catatan ihwal momentum pemilihan langsung ini bila dikaitkan dengan pertanyaan: Mengapa Pilkada Sulut 2020 mencapai hasil yang melampaui target partisipasi pemilih nasional? Pertanyaan itu juga bisa diringkas lagi menjadi: Mengapa pemilihan langsung di Sulut selalu berhasil? Bisa juga disederhanakan: Mengapa orang Sulut suka memilih? Di sini, Argumen historis adalah jawaban sederhananya. Sumber *Algemeen Indisch Dagblad* edisi 18 Mei 1951 menyebutkan Sartono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa itu, memandang Minahasa sebagai daerah dengan 95 persen penduduk yang melek huruf. Kondisi itu sangat menguntungkan untuk uji coba pemilihan langsung.

DR. Denni H.R. Pinontoan, M.Theol adalah salah satu dari deretan penulis Minahasa yang punya rekaman sempurna tentang Pemilu 1951 yang berlangsung di wilayah berpenduduk 503.929 jiwa, dengan daftar pengantong hak pilih sebanyak 209.992 orang. Dalam artikelnya yang berjudul: “Pemilu di Minahasa tahun 1951, Pemilihan Langsung Pertama di Indonesia” yang



dilansir katanisme.blogspot.com mendeskripsikan, tahun awal demokrasi langsung di Indonesia ini berjalan sebagaimana gambaran pemilu masa kini yang bertaburan Pamflet dan spanduk-spanduk kampanye mengisi tempat-tempat umum.

“Rakjat! Pilihlah Jang Berani dan Djudjur” begitu bunyi sebuah iklan kampanye ketika itu, tulis Pinontoan. Ada propaganda yang dilancarkan para pendukung fanatik yang saat ini lebih dikenal sebagai penggaung atau buzzer politik. Ada pesta yang diselenggarakan para calon untuk menarik simpati pemilih. Kampanye yang ramai. Mobil-mobil yang ditemplei plakat (Stiker). Keramaian ini ungkap Pinontoan disebabkan adanya anggapan menjadi anggota DPR adalah suatu kehormatan besar.

Saat berlangsung pemungutan suara untuk pemilihan 25 anggota dewan itu pada 14 Juni 1951, sebanyak 150.000 pemilih menggunakan hak pilihnya atau 73 persen penduduk yang berhak memilih memberikan suara. Majalah Merdeka, edisi 1 Desember 1951 menulis peristiwa itu sebagai “Pemilihan Umum: Dari Rakjat, untuk Kepentingan Rakjat”. Reportase jurnalistik itu sendiri melihat ada perbedaan dengan pemilihan di Yogyakarta yang menggunakan sistem bertingkat, sementara di Minahasa memakai sistem langsung.

Boyd R. Compton dalam bukunya, secara detil mengulas proses pemilu langsung itu di antaranya: “Setelah pencocokan nama dengan daftar pemilih, setiap pemilih diberi kartu suara menurut nama-nama



calon, baik yang tampil secara individu maupun yang tampil dari partai atau sebuah organisasi. Setiap pemilih mencoblos kartu suara secara rahasia untuk satu orang kandidat. Sesudah pemungutan suara berakhir, kotak suara disegel dan dibawa ke ibukota daerah, tempat semua kartu suara dihitung oleh sebuah panitia tunggal.

Cara perhitungan hasil pemilihan yang dipakai adalah membagi jumlah suara yang masuk dengan jumlah Kursi yang harus diisi. Seorang calon dinyatakan terpilih jika perolehan suaranya melampaui jumlah ini, dan sebuah partai memperoleh kursi sesuai dengan jumlah hasil-bagi pemilihan dengan suara yang didapatnya. Pada perhitungan pertama, lima belas dari dua puluh lima kursi dimenangkan oleh tujuh partai yang terdaftar.

Pada penghitungan kedua, para calon dan partai-partai dibolehkan bergabung, jika gabungan suara melampaui hasil-bagi pemilihan, satu kursi diberikan kepada suara terbesar dalam gabungan itu. Dua kursi diperebutkan dalam penghitungan kedua.

Untuk penghitungan-penghitungan berikutnya, digunakan sistem d'Hondt (suara rata-rata tertinggi), dan delapan kursi dibagi-bagi” (Halaman 233 – 235 Compton, Boyd R. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*).

Di Minahasa sendiri, praktik pemilu modern seperti pengaturan hak memilih, pengaturan syarat calon, daerah pemilihan dan jumlah kursi, telah dipraktikkan pada pemilihan anggota Minahasaraad yang keberadaannya sejak 1918.



Tata cara Pemilihan Anggota Minahasaraad diundangkan melalui Staatsblad 1929 nomor 355 sebagai perubahan Ordonnansi tertanggal 8 Februari 1919, Staatsblad nomor 65 yang sebelumnya diubah terakhir dengan Ordonnansi 6 September 1927.

Ketika sejarah mencatat bagaimana pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertama tahun 1955 dengan demokratis dan sukses, pemilu Minahasa 1951 telah dijadikan kiblat demokrasi electoral tersebut. Bahkan, sistem pemilihan langsung yang diadopsi dalam penyelenggaraan pemilu 1955 meraih tingkat partisipasi yang tinggi.

## **B. PEMILIHAN KAPITALAU DI SANGIHE TALAUD**

Perbincangan mengenai demokrasi lokal muncul secara dramatis jelang abad 21. Desa bahkan menjadi ruang utama dan terutama dalam diskursus dan praktik demokrasi, karena di sanalah berada dasar hakiki dari teori dan praktik demokrasi itu sendiri. Di lain sisi, aktivitas pemilihan kepala desa dipandang sebagai proses demokrasi yang terjadi di desa.

Sangihe Talaud adalah salah satu entitas budaya, di Sulawesi Utara, sebagaimana Minahasa dan Bolaang Mangondow yang memiliki sejarah demokrasi sejak masa lampau. Pada tingkat desa, proses pemilihan Kepala Desa seperti Kapitalau di Sangihe Talaud sejak masa lalu telah dipilih secara demokratis melalui sebuah sistem demokrasi yang dianut masyarakatnya.





Di era Kerajaan Sangihe di pulau Sangihe, sebelum bahkan hingga zaman Belanda, kriteria seorang calon Kapitalau atau Opo Lao (Kepala Desa): Pertama, dinilai dari kekerabatan dengan raja. Kedua calon harus mempunyai pengetahuan tulis baca dan punya kemampuan memimpin, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang berdasar pada kearifan lokal semisal, “Puihase” dan “Papia Naung”. Keempat, calon sudah punya pengalaman misalnya pernah menjabat hukum mayor. Kelima, disepakati oleh masyarakat kemudian diajukan kepada majelis kerajaan. Kalau ada 3 calon maka majelis kerajaan melakukan musyawarah mufakat siapa yang paling pas menjadi Kapitalau.

Sebelum diajukan ke Majelis Kerajaan, proses pemilihan di masyarakat adalah dimulai dari wilayah-wilayah pemukiman (lindungan). Dari tiap- tiap lindungan memberi suara kepada kepala Lindungan (Hukum Mayor) untuk mengusulkan nama mewakili lindungan. Tapi untuk membawa suara ke forum tingkat kerajaan adalah para Hukung Mayor yang disebut juga Hukum Mayore.

Di era Kerajaan Siau di pulau Siau, sistem pemilihan Kapitalau juga sudah berlangsung secara demokratis di setiap desa. Jupiter Makasangkil, sejarawan dan budayawan kelahiran Siau mencontohkan, proses pemilihan Kapitalau di kampung Bahu pada tahun 1914, seorang calon bukan saja dipilih masyarakat kampung tersebut secara demokratis di tingkat bawah, tapi melibatkan dukungan berupa usulan dari kampung bertetangga.



Artinya ada kampung-kampung lain yang bisa mengusulkan satu orang atau menguatkan kandidat di kampung pengusul. Bentuk usulan bukan untuk memilih/dipilih tetapi untuk menguatkan calon yang diajukan oleh kampung pemilihan. Sistem ini dimaksudkan agar Kapitalau yang terpilih merupakan pemimpin yang juga bisa diterima dan berpengaruh di kampung lainnya.

Proses pemilihan tersebut baru berakhir saat Jepang masuk di Sangihe Talaud. Kipitalau di masa Jepang ditunjuk langsung oleh penguasa Jepang, hingga era masuknya tentara NICA yang menjadi masa akhir kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud. Di zaman NICA, model pemilihan Kapitalau sebelumnya coba dibangun kembali, tetapi suasana demokrasi telah berubah, dan paham kebangsaan menguat lewat masuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) bentukan Soekarno di Siau.

PNI Cabang Siau berdiri pada tahun 1928 dipelopori GE Dauhan berdasarkan surat mandat pendirian cabang yang ditanda tangani Soekarno. PNI Cabang Siau adalah cabang kedua di luar Jawa. Di lain sisi, Residen Smith di Manado melihat gejala tidak sehat di Siau bahkan di Sangihe mulai tahun 1930-an itu, karena raja sudah berpolitik.

Ini sebabnya, Raja Tahuna, Raja Tabukan, Raja Siau, dibuang ke pengasingan dengan alasan memakai uang pajak, tetapi sebenarnya mereka justru memberi payung kepada PNI dan gerakan kebangsaan nasionalis.

Dari situ dimulai penentuan calon Kapitalau dan pengangkatannya harus ada persetujuan residen



di Manado. Pemilihannya diawasi oleh Aspiran Controleur.

Sistem pemilihan di tingkatan kampung sesudah NICA atau diawal Indonesia merdeka dilakukan dengan cara “Mencabut Lidi”. Misalnya ada 3 kandidat Kapitalau, maka disiapkan untuk masing-masing kandidat 1 kotak. Setiap wajib pilih yang terdaftar harus mengambil Lidi kemudian masuk ke dalam bilik pemilihan untuk memasukan lidi ke kotak calon yang menjadi pilihannya. Sistem pemilihan ini menurut Makasangkil, tidak bertahan lama, karena ketika Kapitalau sudah terpilih dapat diketahui siapa yang memilih atau tidak memilih.

Akibatnya membuat kampung tidak aman dan terjadi persekusi. Sistem pemilihan kemudian berubah menggunakan pola coblos pada kertas suara dengan lambang buah-buahan seperti Durian, Mangga, Pisang, Jambu. Saat ini berubah menjadi pemilihan langsung dengan cara coblos gambar kandidat.

Dapat disimpulkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Sangihe Talaud, sistem pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis pada tingkat awal. Kemudian, pada tingkat akhir menggunakan sistem perwakilan. Terkait partisipasi pemilih, pemilihan Kapitalau dalam tradisi masyarakat Sangihe Talaud dipandang sebagai kewajiban yang harus dilakukan setiap pemegang hak pilih. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya frasa “Ko kau meki tekeng apa su kampung, sedang nenengale Lidi Tala”.



Frasa itu mengisyaratkan sebuah makna di mana proses pemungutan suara atau pemilihan dipandang sebagai peristiwa berharga. Bahkan tindakan memilih itu adalah sebuah citra diri. Ini sebabnya, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Kapitalau sejak masa lampau selalu tinggi. Apabila pada hari pemilihan ada pemegang hak pilih tidak datang memilih, yang bersangkutan akan dijemput Polisi Kampung untuk memilih. Pengecualian hanya diberikan kepada mereka yang berada di luar daerah.

Di Sangihe Talaud ada budaya malu ketika tidak menggunakan hak memilih. Seseorang harus menggunakan hak pilihnya karena itu menunjukkan adanya pengakuan dirinya sebagai warga. Seseorang yang tidak hadir dalam pemilihan biasanya menjadi bulan-bulanan. Nanti di masa pemerintahan Republik Indonesia dengan perberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pertama, sampai di pemerintahan kampung pemilihannya berlaku demokratis di mana kampung menentukan sendiri tata cara pemilihan melalui Komite Pemilihan Kapitalau.

Dari situ berkembang hingga dengan Undang-undang pemerintahan terakhir ini keluar yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Pemdes, pemilihan berjalan sebagaimana bentuknya yang sekarang, yaitu pemilihan langsung.



## C. PEMILIHAN SANGADI DI BOLAANG MANGONDOW

Kamis, 14 November 2019, ada pemandangan menakjubkan di Bolaang Mangondow Raya (BMR). Sebanyak 105 desa di negeri Bogani ini secara serentak melakukan pemilihan langsung Sangadi (Kepala Desa). Ini peristiwa yang semarak. Para aparaturnya Sipil Negara, tenaga harian lepas dan tenaga honorer yang mukim di 105 desa mendapatkan jatah libur. Pemilihan ini melibatkan 81.159 pemilih. Para pemilih menyalurkan hak pilihnya secara demokratis pada 141 bilik Suara di 141 Dusun.

Hari-hari berikutnya, di tahun yang sama adalah waktu yang mengejutkan dan menggembirakan bagi Gita Ratnasari Tuuk (26). Perempuan kelahiran 22 Juli 1993 ini mendadak viral di media sosial, daring dan cetak di Indonesia. Tak saja pesona kecantikannya yang membuat orang menoleh, tapi keterpilihannya sebagai Sangadi di Desa Bombanon, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadi fenomena tersendiri bagi kaum perempuan dan milenial.

Seakan ada matahari baru yang terbit di tengah kultur demokrasi pemilihan kepala desa di bumi Bogani. Kehadiran generasi semacam Gita yang muda, jenial dan visioner pada level kepemimpinan sebuah desa yang notabene masih membaunkan aroma tradisional, tak saja menjadikan momentum pesta demokrasi tingkat desa ini ramai, namun ikut mengisi aliran sejarah demokrasi di tanah kelahirannya.



Pemilihan Sangadi umumnya di daerah Bolaang Mongondow Raya (BMR) saat ini, prosesnya dilaksanakan menurut aturan perundang-undangan terkini. Tapi tradisi pemilihan langsung semacam itu telah memiliki akar kokoh dalam sejarah sejak masa para leluhur Bolaang Mongondow. Hajatan yang digelar tiap lima tahun ini disesuaikan dengan habis masa jabatan Sangadi sebelumnya. Pemilihan Sangadi seperti di daerah lain, juga melibatkan partisipasi masyarakat secara umum, tak jarang, tensi sering memanas karena perbedaan pilihan.

Dalam prosesnya, Panitia Pemilihan Sangadi membuka informasi pencalonan kepada masyarakat, kemudian dilakukan pemilihan langsung yang digelar di satu tempat pemungutan suara. Pemilihan Sangadi biasanya tidak menyebutkan nama, namun menggunakan lambang tumbuhan seperti padi, kelapa atau kapas. Sangadi terpilih yakni mereka yang memperoleh suara terbanyak saat perhitungan suara.

Sangadi biasanya dipilih warga berdasarkan ketokohan atau faktor kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Di Bolaang Mongondow Timur misalnya, pemerintah setempat sering menggelar pemilihan Sangadi secara serentak sehingga nuansa ini terlihat di mana-mana. Salah satu Sangadi hasil pilihan di Desa Bongkuday, Kecamatan Modayag, Boltim adalah Delly Mamonto.

Sebagai tokoh perempuan di desanya, Delly mendapat dukungan dari tokoh masyarakat untuk ikut menjadi



salah satu kandidat pada Pilsang (Pemilihan Sangadi) tahun 2018.

Sebagaimana Gita Ratnasari Tuuk, sangadi Bombanon, Delyanty Mamonto SE adalah generasi BMR yang memiliki watak kepemimpinan yang diwarisi dari kultur leluhurnya. Ia menjabat Kepala Desa Bongkudai sejak 2018. Kendati tetap melekat erat pada tradisi budaya moyangnya, sebagai generasi terkini, penampilannya nampak berbeda. Ia modern dan Fashionable. Ia memiliki latar belakangnya sebagai penyanyi. Kebiasaan ngomongnya tanpa basa-basi. Di saat bekerja ia begitu tegas, tanpa kendor sedikitpun. Apapun bentuk kebijakan yang menyimpang akan dihadapinya.

Sangadi wanita sekaligus musisi ini, banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya hingga saat ini. “Saya lahir di Bongkudai, sejak kecil memang sudah memiliki jiwa entertain, banyak ajang saya ikuti sebagai pembentukan karakter yang melatih rasa percaya diri saya.

Banyak juga organisasi yang saya ikuti sebelum dan sesudah saya jadi sangadi. Saya pernah menjabat Ketua Fatayat NU (Kowani) Boltim tahun 2012, dan sekarang sebagai sekretaris Fatayat NU Boltim. Saat terpilih menjadi Sangadi Bongkudai, pernah juga menjadi Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Sempat masuk juga di jajaran pengurus KNPI Boltim, dan banyak organisasi lainnya,” tutur Sangadi nyentrik ini.

Selain sebagai seorang entertainer yang mumpuni



dan berprestasi, ia juga pernah Juara 1 ajang Lomba Pidato bahasa Inggris mewakili Kabupaten Bolaang Mongondow di Manado tahun 1997, tahun 1998. Lewat asuhan vokal Bambang Ginoga ia mendapat juara 1 ajang Bintang Vokalia tingkat umum se-Bolaang Mongondow yang saat itu diadakan di gedung Gelora Ambang Kotamobagu.

Pada 2006 terpilih menjadi Nanu Bolmong, dan di tahun 2007 terpilih sebagai the best couple dalam ajang pemilihan model sophie martin bersama Cakra yang saat itu menjabat sabagi Uyo 2006. Kepercayaan dirinya dalam memimpin tak lain adalah hasil dari perjalanan hidupnya yang sudah matang di berbagai panggung publik.

“Sifat seorang musisi itu fleksibel, maka profesi itu bisa dilekatkan pada bidang apa saja, baik itu panggung hiburan, hingga ke panggung politik,” tukasnya. Menurut Delly, tiga tahun kepemimpinannya sebagai Sangadi, banyak pelajaran yang ia peroleh, mulai dari keluhan warga, hingga menyelesaikan persoalan di tingkat desa.

Delyanty Mamonto sebagai Sangadi, sempat viral di medsos pada Februari 2018. Karena saat menghadiri Rakornas di Jakarta ia mendapat kesempatan berbicara langsung kepada Menteri dan Presiden, dan ia terpilih dan masuk di 5 Kepala Desa Terbaik se-Indonesia.

“Saat ada kesempatan bicara, saya gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ada empat poin yang saya utarakan, pertama, inti dari rencana pembentukan





Provinsi BMR, kedua, tentang kesejahteraan Kepala Desa. Ketiga, meninjau dan memprogres kembali program NawaCita, dan keempat, menseriusi atau mempercepat perubahan data statistik, hingga sebagai contoh program PKH itu bisa tersalur dengan benar melalui data statistik terbaru,” ungkap Deli sapaan akrabnya.

#### **D. OTONOMISASI DAERAH DAN PILKADA**

Dalam sebuah personifikasi Goenawan Mohamad, hubungan birokrasi antara pusat daerah dalam sebuah Negara, diumpamakan sebuah monolog yang tak habis-habis berbicara dengan bahasa yang tak mau jelas. Bahkan dalam bentuknya yang peyoratif diandaikan sebuah kastil yang 50 persen imajinir, nampak perkasa namun membuat kita terbentur-bentur, bahkan tersekat.

Ini sebabnya di Indonesia, saat kebijakan Otonomi Daerah (Otda) berhembus, banyak pihak berharap instrumen ini bisa mendukung cita-cita ideal seperti memunculnya identitas lokal, di samping meningkatnya pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Identitas lokal yang dimaksud adalah terakomodasinya sistem kultur dan sosial masyarakat yang berbeda di setiap daerah. Sebagai negara yang dicirikan oleh heterogenitas suku, bahasa, budaya, bangsa, agama, golongan, dan adat istiadat. Indonesia sejak berdirinya dibangun di atas sebuah sistem politik pemerintahan yang bersumber dari aneka nilai-nilai



kultur itu. Sistem perpolitikan itu bernama demokrasi Pancasila yang disebut Soekarno sebagai sebuah sistem yang bersumbu dan berakar pada heterogenitas masyarakat Indonesia.

Kembali ke sistem kultur demokrasi lokal sejatinya juga telah menjadi suatu kesadaran baru dalam masyarakat dunia modern. Para ahli menyebutkan, pulang ke identitas lokal tak saja dipandang sebagai pemerintahan lokal dengan segala sistem administrasinya yang hanya berfungsi menarik pajak dan menyediakan pelayanan pokok seperti pendidikan dasar, air bersih, penyaluran limbah, transportasi, maupun perumahan.

Pemerintahan lokal haruslah menjadi landasan terciptanya demokrasi yang jauh lebih bermutu dengan masyarakatnya yang langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Tanpa demokrasi lokal yang kuat dan efektif, akan sulit terwujudnya demokrasi di tingkat nasional yang sehat.

Cita-cita ideal itu pun baru bisa terwujud bila instrumen otonomi daerah dipersepsikan sebagai jalan raya yang lebih baik bagi kebijakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apabila sebelumnya Pilkada dilakukan DPRD, berubah menjadi dipilih langsung oleh masyarakat. Di situlah tumpuan citra ideal itu mekar.

Tambahan harapan itu setidaknya dilandasi beberapa hal antaranya, di mana Pilkada di era otonomi



daerah akan melahirkan figur pemimpin yang berasal dari daerah yang akan dipimpinya, mengenal kondisi daerahnya, dan punya keterkaitan emosional nan erat dengan masyarakat. Otda diharapkan membawa keluar posisi masyarakat yang awalnya hanya objek berubah menjadi subjek.

Dari sisi aksesibilitas, Otda mendorong adanya kemandirian mengelola daerah yang diberengi pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kian terbukanya hak bagi semua orang menduduki jabatan publik.

Sebagaimana anasir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya lewat prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pengertian sederhana, otonomi daerah adalah pemberian kewenangan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah itu sendiri, kecuali beberapa urusan seperti: Hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan dan keamanan tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

Kembali pada keterkaitan Otda dan Pilkada. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat dari sisi kuantitas. Tapi secara administrasi elektoral, Indonesia lebih kompleks ketimbang India dan Amerika Serikat,



tulis Burhanuddin Muhtadi. Bercermin pada pemilu presiden 17 April 2019 yang dilakukan serentak kata dia, jumlah total penyelenggara pemilu lebih dari 7,3 juta orang untuk melayani 192 juta pemilih tetap.

Meskipun masih banyak kekurangan, rekam jejak penyelenggaraan pemilu secara umum dinyatakan baik. Selanjutnya, terwujudnya politik elektoral yang berintegritas harusnya menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi. Namun sejumlah studi, ungkap Muhtadi, membuktikan agenda peningkatan integritas politik elektoral kita masih dihambat oleh maraknya politik uang.

Proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen, sebutnya. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia.

Kerisauan paling dekil dalam kaitan itu adalah perilaku aktor baik parpol, politisi, birokrasi maupun masyarakatnya. Pengamat politik Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si dalam sebuah artikelnya bahkan mempertanyakan: Maukah parpol mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum Pilkada dimulai. Maukah mereka memberi kesempatan kepada figur-figur yang mapan, berakhlak dan diyakini mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Kerisauan ini tentu beralasan kuat, karena dengan pilkada akan lahir kepala daerah yang mampu mengemban tujuan suci otonomi daerah.



Liando menilai, tingginya angka korupsi oleh Kepala Daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita Otda itu masih tersekat dalam kastil imajir sebagaimana diandaikan Goenawan. Masih mengawang-awang. Bahkan, Kebijakan Otda baru sekadar dinikmati segelintir politisi dan oknum pengusaha.

Lebih basi lagi, momentum pilkada sering dijadikan sebagian Kepala Daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye. Sebagian lagi menarik setoran bagi pejabat diangkat ke posisi tertentu. Promosi jabatan dikaitkan dengan jasa saat kampanye Pilkada.

Praktik buram itu, kata Liando, mendorong pejabat tidak berlagak sebagai pelayan, namun selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Sudah menjadi berita yang lazim bila kita mendengar kasus Markup dan Markdown anggaran, laporan fiktif, manipulasi bansos maupun perbanyakkan kegiatan lapangan untuk meraup SPPD.

Pilkada di era otomi daerah juga masih diwarnai terpilihnya figur-figur yang tak mumpuni, karena keterpilihannya karena politik perut atau *Money politic* (politik uang). Di sisi lain, pertimbangan peralihan mekanisme pilkada oleh DPRD menjadi pilkada langsung sudah jelas bertujuan memangkas praktik *money politics*. Logika beberapa ahli mengatakan, dalam pilkada langsung seorang calon tidak punya



kemampuan membeli suara rakyat yang jumlahnya banyak. Namun fakta berkata lain.

Pilkada langsung pun masih berbau uang. Kadang berlangsung masif melibatkan ongkos yang mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Beberapa hasil penelitian menyebutkan tahapan politik uang itu sudah dimulai dari mencari dan menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, hingga biaya treatment untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Ini sebabnya pilkada di era Otda pun masih dibanjiri kecaman menyangkut tindakan memperjualbelikan parpol kepada yang tidak pantas. Praktik semacam itu adalah kegagalan cita-cita Otda dan bentuk penghianatan terhadap publik.

Output yang diharapkan dari suatu Pilkada sejatinya adalah terciptanya sistem Pemerintahan Daerah yang ideal. Keidealan itu harusnya didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas. Karena meski instrumen peraturan telah dibuat sebaik mungkin dalam penciptaan sistem Pemerintahan Daerah yang ideal, bila aparatur pelaksanaannya dan pengawasnya tidak berintegritas, maka akan sulit tertepiskan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejak Juni 2005, pergantian kepala daerah di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Ada harapan terbetik di sana, di mana pergantian kepala daerah lewat pilkada secara langsung akan mampu meminimalkan praktik politik uang. Sebab sebelumnya, pemilihan kepala daerah berlandaskan UU No. 22 Tahun 1999 sarat gejala semisal distorsi aspirasi publik, indikasi politik uang, dan oligarkhi partai yang tampak dari intervensi DPP partai dalam menentukan calon kepala daerah yang didukung fraksi. (Dede Mariana, 2007: 47).

Sementara jauh di bawah akar rumput, rakyat mengantung harap, otonomi Daerah akan menjadi kesempatan bagi daerah dalam mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi daerah melalui kewenangan yang ada pada daerah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber:

- Algemeen Indisch Dagblad edisi 18 Mei 1951.
- Denni H.R Pinontoan, Pemilu di Minahasa tahun 1951, Pemilihan Langsung Pertama di Indonesia, *katanisme.blogspot.com*
- Sejarah Bolaang Mongondow', Kotamobagu, Maret, 2003.
- Kaghoo Max S, Jejak Leluhur, Warisan Budaya di Pulau Siau, PT. Kanisius 2016.
- Tinungki Iverdixon, Nusa Utara, Dari Masa Purba Hingga Era Kerajaan, PT. Barta Sulut Mandiri, 2020.
- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS,
- JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 2, Nomor 1, Desember 2016
- Compton, Boyd R. Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia, PT Pustaka LP3ES. 1993
- Ferry Daud M. Liando, Otonomi Daerah Terbelenggu Pilkada, <https://aipi-politik.org>
- Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS
- *Demokrasi di tingkat lokal - International IDEA*
- <http://elektoral.id>
- <https://klik24.id>
- <https://sulut.kpu.go.id>
- <http://www.kpu-minahasakab.go.id>
- *Tempo.co*





Wawancara:

- Denni H.R. Pinontoan, Pemilu 1951 di Minahasa.
- Max Surdirno Kagho, Proses Pemilihan Bobatong Datu di Sangihe Talaud.
- Jupiter Makasangkil, Pemilihan Kapitalau di Sangihe Talaud
- Jan Rafles Takasihaeng, Pemilihan Kapitalau di Sangihe Talaud

# **BAB 2**

## **SELINTAS PILKADA SULUT**







## SELINTAS PILKADA SULUT

### A. Pemerintahan Daerah Sebelum Pemilihan Langsung

**P**rovinsi Sulawesi Utara yang sering disingkat dengan Sulut ini terletak di bagian paling utara dari semenanjung Pulau Sulawesi dan menjadi gerbang Indonesia di utara. Provinsi Sulawesi Utara didirikan pada tanggal 23 September 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964. Hari jadi provinsi ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1959. Ibu kotanya berada di Kota Manado.

Sebelum berdiri sendiri sebagai provinsi, Sulawesi Utara bergabung dengan Sulawesi Tengah dengan nama Sulawesi Utara-Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 47 Tahun 1960. Namun, jauh sebelumnya dua provinsi ini tergabung dalam Provinsi Sulawesi yang dipimpin tokoh asal Sulut Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau dikenal Sam Ratulangi.

Provinsi yang berjuluk Bumi Nyiur Melambai ini memiliki moto “Sitou Timou Tumou Tou” yang berarti “manusia hidup untuk memanusiaakan manusia lain”. Sulawesi Utara dikenal sebagai kawasan dengan karakter masyarakat yang ramah dan terbuka. Provinsi ini memiliki luas 13.892 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa pada tahun 2019. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 11



kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa.

Wilayah Sulawesi Utara mempunyai sejarah peradaban manusia yang cukup menarik. Pada masa pleistosen jutaan tahun yang lalu, wilayah ini merupakan satu daratan dengan Filipina. Daerah ini juga menyimpan banyak benda-benda purbakala. Temuan benda purbakala berupa gua-gua purba di Minahasa, fosil gading dan geraham gajah purba di Pulau Sangihe, belung batu persegi dari zaman neolitik, dan masih banyak lainnya.

Dalam buku “Sejarah Daerah Sulawesi Utara” disebutkan arkeolog asal Inggris bernama Peter Bellwood menemukan pecahan-pecahan belanga dari tanah liat di Gua Tuwomanei, Desa Arangkaa, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Di sana ditemukan pula alat-alat dari batu yang digunakan sebagai pisau atau anak panah, tulang manusia, kerang, dan alat dari perunggu. Alat-alat dari batu tersebut diduga telah digunakan sejak zaman Blade atau Flake yakni sekitar 5000–2500 sebelum Masehi. Sedangkan, alat dari besi dan perunggu diduga muncul sejak 200 Sebelum Masehi.

Masih menurut buku yang sama, kerajaan pertama yang berkuasa di Sulawesi Utara adalah Kerajaan Suwawa. Kerajaan Suwawa berdiri sekitar tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi dengan Mokotambibulawa sebagai raja pertama.

Kemudian berdiri Kerajaan Manado (1500-1678) yang menggantikan Kerajaan Bolaang. Kerajaan Manado pada waktu itu meliputi pulau-pulau sekeliling Minahasa dan



sepanjang pantai Minahasa. Kerajaan Manado hilang diakibatkan oleh peperangan yang terjadi dengan raja-raja Bolaang, serta persengketaan-persengketaan dan juga kekurangan bahan makanan.

Belanda memasuki wilayah Talaud sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pemerintahan Sulawesi Utara dipegang oleh Bangsawan Tuan Resident Duur. Pada 1824, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Keresidenan Manado yang meliputi wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sekarang ini. Keresidenan Manado ini merupakan pecahan dari Keresidenan Ternate. Hal itu diatur sesuai Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 14 Juni 1824, Nomor 10 (Staatsblad 1824 Nomor 28 a). Manado ditetapkan menjadi keresidenan definitif, terlepas dari Ternate, dan Johannes Wensel ditunjuk sebagai residennya.

Pada pemerintahan Belanda, daerah Bolaang-Mongondow dijadikan daerah administratif yang disebut Onderafdeling dan Residentie. Daerah tersebut dipimpin oleh seorang Controleur yang dibantu oleh seorang Adspirant Controleur. Di masa itu juga dibuat perjanjian politik antara Belanda dan wilayah jajahan yang disebut Korte Verklaring (perjanjian pendek) tentang tanam paksa (cultuur stelsel).

Pemerintahan Jepang di Sulawesi Utara (1942–1945) berawal dari mendaratnya Jepang pada 11 Januari 1942. Kala itu, seluruh pemerintahan dikatakan beku karena seluruh wilayah distrik diambil alih oleh komandan Jepang.

Sebelumnya terdapat 7 distrik yang dibentuk pada zaman Belanda yakni Manado, Tonsea, Tondano, Kawangkoan, Langowan, Amurang, dan Ratahan. Namun, pada Mei 1942



Jepang menambahkan distrik Tomohon dan mengurangi distrik Manado. Saat itu, kepala distrik berubah nama menjadi Guntyo, hukum kedua seorang kepala distrik bawahan disebut Huku-Guntyo, dan hukum tua disebut Sontyo. Ketika kekalahan Jepang yang secara resmi sudah diakui kepada Pasukan Sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944 dan Indonesia resmi merdeka pada 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Sulawesi Utara.

Pada awal kemerdekaan RI, daerah ini berstatus keresidenan dan masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar dengan Gubernurnya, DR.G.S.S.J. Ratulangi. Pertempuran antara rakyat Sulawesi Utara tepatnya Manado dengan Belanda dikenal dengan Peristiwa Merah Putih pada 14 Februari 1946. Peperangan tersebut berakhir dengan berhasilnya rakyat Manado mempertahankan wilayahnya dan seutuhnya menjadi bagian dari Indonesia.

Setelah peristiwa tersebut, dikeluarkanlah Maklumat Nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1946. Salah satu poinnya menyebutkan para pejuang KNIL dibantu para pemuda telah merebut kekuasaan dari pemerintahan Belanda atau NICA Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Tahun 1948 di Sulawesi dibentuk Negara Indonesia Timur, yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Indonesia Timur dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor UU 13 Tahun 1964, dibentuk Provinsi Sulawesi Utara.



Dalam perkembangannya, tercatat satu momentum penting dalam lembar sejarah pembentukan Sulawesi Utara, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 (23 September 1964) yang menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Manado. Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.

Adapun daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah Sulawesi Utara, yaitu Kotamadya Manado, Kotamadya Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe Talaud. Gubernur Provinsi Dati I Sulawesi Utara yang pertama adalah FJ Tumbelaka.

Berdasarkan Perpu No. 47 Tahun 1960, Sulawesi Utara bergabung dengan Sulawesi Tengah dengan nama Sulawesi Utara-Tengah. Namun, pada 23 September 1964 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang memecah wilayah Sulawesi Utara-Tengah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dengan hari jadi pada 14 Agustus 1959, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2000, Provinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi dua provinsi. Wilayah Gorontalo yang meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo ditetapkan menjadi provinsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2000.

Dalam perjalanan sejarahnya, Sulawesi Utara sudah dipimpin oleh 16 gubernur baik definitif maupun penjabat





gubernur. Arnold Achmad Baramuli adalah Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah yang menjabat pada 23 Maret 1960 hingga 15 Juli 1962. Saat AA Baramuli menjadi gubernur, Frits Johannes Tumbelaka menjadi wakil gubernurnya. Tumbelaka kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah (Sulutteng) kedua, sekaligus Gubernur Sulawesi Utara pertama. Ia mulai menjabat 15 Juli 1962 hingga 19 Maret 1965.

Gubernur Sulawesi Utara selanjutnya adalah Soenandar Prijosoedarmo (19 Maret 1965 – 27 April 1966), Abdullah Amu (27 April 1966 – 2 Maret 1967), Hein Victor Worang (2 Maret 1967 – 21 Juni 1978), Willy Lasut (21 Juni 1978 – 20 Oktober 1979). Selanjutnya, Penjabat Gubernur Erman Hari Rustaman (20 Oktober 1979 – 3 Maret 1980), Gustaf Hendrik Mantik (3 Maret 1980 – 3 Maret 1985), Cornelis John Rantung (3 Maret 1985 – 1 Maret 1995), Evert Ernest Mangindaan (1 Maret 1995 – 31 Maret 2000), Adolf Jouke Sondakh (1 April 2000 – 18 Maret 2005), Penjabat Gubernur Lucky Harry Korah (18 Maret 2005 – 13 Agustus 2005).

Kemudian, Sinyo Harry Sarundajang (13 Agustus 2005 – 13 Agustus 2010), Pelaksana Harian Robby Mamuaja (13 Agustus 2010 – 14 September 2010), Sinyo Harry Sarundajang (20 September 2010 – 20 September 2015), Siswa Rachmat Mokodongan (20 September 2015 – 21 September 2015), Soni Sumarsono (21 September 2015 – 12 Februari 2016), Olly Dondokambey (12 Februari 2016 – 26 September 2020). Saat ini, Sulut dipimpin oleh Penjabat Gubernur Agus Fatoni dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.



Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 4 kota, 11 kabupaten, 171 kecamatan, 332 kelurahan, dan 1.507 desa. Keempat kota tersebut yakni Kota Bitung, Kotamobagu, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Kesebelas kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Minahasa Utara.

Pada Pemilu pertama tahun 1955, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) meraih tempat teratas di wilayah Sulawesi Utara dengan perolehan 101.209 suara atau 29,29 persen. Keunggulan Parkindo tersebut banyak disokong oleh besarnya komposisi agama Kristen di daerah ini. Ladang subur bagi Parkindo ketika itu berada di Manado, Minahasa, dan Sangihe Talaud.

Di urutan kedua, Partai Nasional Indonesia (PNI) berhasil meraih 18,55 persen suara. Disusul Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) 10,54 persen suara, Partai Komunis Indonesia (PKI) 8,84 persen suara, Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) 8,72 persen suara. Sementara itu, Partai Katolik, Persatuan Indonesia Raya (Hazairin), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Gerakan Pembela Pancasila hanya meraih suara di bawah 5 persen.

Pemilu 1971–1997, kepopuleran partai-partai berideologi agama, baik Islam maupun Kristen terhenti sejak pemilu



pertama di era Orde Baru. Selama masa itu, Partai Golkar mendominasi perolehan suara di tiap pemilu di wilayah Nyiur Melambai tersebut. Pada Pemilu 1971, partai Golkar berhasil meraup 69,16 persen suara. Partai berlambang pohon beringin tersebut menguasai perolehan suara di Kabupaten Sangihe Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Manado.

Adapun Parkindo sebagai wadah pemilih Kristen hanya mendapatkan 14,6 persen di salah satu ladang suburnya, Manado. Minahasa dan Sangihe Talaud sebagai dua wilayah favoritnya pada Pemilu 1955 pun hanya mampu menyumbang masing-masing 10 persen dan 9,4 persen suara. Hal yang sama juga dialami oleh partai politik Islam. Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan basis partai politik Islam pada Pemilu 1955 hanya tinggal kenangan.

Eksistensi Golkar terus meningkat pada pemilu tahun 1977. Pada pemilu tersebut perolehan suara Golkar meningkat menjadi 73 persen. Disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 13 persen, kemudian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan perolehan suara 9 persen. Posisi Golkar kian menguat hingga kembali menang pada Pemilu 1982.

Partai berwarna kuning tersebut berhasil memperoleh suara sebanyak 82 persen. Kemenangan Golkar disusul oleh PPP dengan perolehan suara 7 persen, dan PDI dengan perolehan suara 6 persen.

Pada Pemilu 1987, Golkar kembali memperoleh suara terbanyak yakni 87 persen. Sedangkan PDI berhasil



menggeser posisi PPP dengan memperoleh suara 7 persen untuk PDI dan 5 persen untuk PPP. Kekuatan partai Golkar masih tak tersaingi hingga Pemilu 1992. Dalam pemilu tersebut, Golkar kembali menjadi pemenang dan memperoleh suara 88 persen. Disusul oleh PDI dengan perolehan suara 7 persen. Sedangkan perolehan suara PPP semakin menurun menjadi 4 persen.

Pemilu 1997 Sulawesi Utara merupakan pemilu paling berjaya bagi partai Golkar. Partai berwarna kuning ini berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, yakni mencapai 95,74 persen. Sedangkan perolehan suara PPP turun menjadi 2,45 persen dan PDI hanya 1,82 persen suara.

Memasuki masa Reformasi, pada Pemilu 1999 perhatian masyarakat terhadap Golkar mulai berkurang. Namun demikian, reformasi tidak berarti mengubah komposisi suara dan struktur politik Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun pengumpulan suaranya turun drastis, Partai Golkar masih meraup 519.302 suara atau 44,22 persen dan tetap berada di posisi teratas. Dari sembilan kabupaten dan kota, Golkar masih mampu menguasai tujuh wilayah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyusul di tempat kedua dengan perolehan suara 333.960 suara atau 28,35 persen. Perolehan suara PDI-P itu banyak didukung oleh pengumpulan suaranya di empat kabupaten dan kota yang rata-rata mencapai sepertiga dari total suara. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Minahasa, kabupaten Sangihe-Talaud, Kota Manado, dan Bitung.



Kondisi yang berbeda justru menimpa partai-partai politik Islam. Baik PPP, PAN, ataupun PKB hanya memperoleh suara di bawah level lima persen. Mereka bahkan tidak mampu merebut wilayah basis pada Pemilu 1955 di Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun Partai Kristen Nasional Indonesia masih meraih 5,11 persen suara.

Pada Pemilu 2004, Golkar masih memenangkan panggung politik Sulawesi Utara dengan perolehan suara 32,32 persen. Disusul oleh PDI-P dengan 16,23 persen suara, Partai Damai Sejahtera (PDS) 14,82 persen, dan Partai Demokrat 14,34 persen suara. Adapun PPP, PAN, PKB, PKPI, PKPB, dan PKS masing-masing memperoleh suara di bawah 4 persen.

Sedangkan di Pemilu 2009, perolehan suara Golkar di Sulut kembali turun dan hanya meraih 24,5 persen suara. Perolehan suara PDIP justru meningkat menjadi 23,4 persen suara.

Partai Demokrat berada di urutan ketiga dengan meraih 15,5 persen suara. Adapun partai lainnya, seperti PDS, PAN, Gerindra, Hanura, PPP, dan PKS memperoleh suara di bawah 7 persen. Golkar meraih suara terbanyak di 4 kabupaten/kota, PDI-P di 8 Kabupaten dan Demokrat di 1 kabupaten.

Pada Pemilu 2014, PDI-P berhasil menggeser posisi Golkar dengan perolehan 449.659 suara (31,7 persen), sedangkan Golkar berada di posisi kedua dengan perolehan 217.267 suara (15,3 persen). Disusul Demokrat di posisi ketiga dengan perolehan 163.843 suara (11,5 persen). Kemudian PAN dengan perolehan 157.309 suara (11,1



persen), Gerindra dengan perolehan 146.217 suara (10,3 persen), dan Hanura dengan perolehan 91.968 suara (6,4 persen). Sedangkan partai lainnya mendapatkan suara di bawah lima persen yakni Nasdem (4,9 persen), PPP (2,2 persen), PKB (1,6 persen), PKS (2,9 persen), PBB (0,6 persen), dan PKPI (1,0 persen).

Pada Pemilu 2019, PDI-P kembali memenangkan panggung politik Sulawesi Utara sekaligus meningkatkan perolehan suaranya. PDI-P berhasil meraup 564.703 suara (38,17 persen). Kemenangan PDIP disusul oleh Nasdem dengan perolehan 248.666 suara (16,8 persen), Golkar dengan perolehan 236.697 suara (15,9 persen), dan PAN dengan perolehan 80.732 suara (5,4 persen).

Sedangkan partai lainnya yang memperoleh suara di bawah 5 persen adalah Demokrat (4,7 persen), Gerindra (4,1 persen), Perindo (3,4 persen), Hanura (2,5 persen), PPP (1,8 persen), PSI (1,8 persen), Berkarya (1,3 persen), PKB (1,1 persen), PKS (1,1 persen), Garuda (0,6 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI (0,2 persen).



## B. Era Pemilihan Langsung

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan suatu keniscayaan, mengiringi proses demokratisasi. Sejak 1 Juni 2005, hajatan itu terus berlangsung, kecuali di daerah tertentu karena "keistimewaannya". Gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta termasuk yang tidak dipilih langsung. Demikian juga seluruh wali kota dan bupati di DKI Jakarta. Mereka tidak dipilih, tetapi ditetapkan langsung oleh gubernurnya.

Praktik Pilkada langsung tidak lepas dari gagasan bahwa "politics is local", di mana proses-proses politik riil pada dasarnya lebih banyak terjadi di tingkat lokal atau daerah. Melalui Pilkada langsung, rakyat bisa secara langsung memilih para pemimpin yang mereka pandang terbaik. Jarak yang dekat antara pemimpin dan yang dipimpin juga memungkinkan adanya proses pembuatan dan implementasi keputusan-keputusan politik yang lebih menguntungkan para pemilih.

Selain proses demokratisasi yang lebih baik itu, Pilkada secara langsung juga memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin "perkecualian" di daerah-daerah. Sejak Pilkada secara langsung, tidak sedikit muncul pemimpin-pemimpin berusia muda, kurang dari 40 tahunan. Memang, dari satu sisi, pemimpin-pemimpin muda itu mungkin kurang pengalaman. Namun, mereka memiliki energi lebih dan acap kali memiliki gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki daerahnya.



Pilkada secara langsung juga memungkinkan munculnya "developmental leaders", pemimpin-pemimpin kreatif-inovatif, untuk melakukan terobosan-terobosan bagi percepatan pembangunan daerahnya. Tidak sedikit dari kepala daerah yang banyak meraih penghargaan merupakan para "developmental leaders" di daerah masing-masing. Meski demikian, Pilkada langsung juga tidak lepas dari kritik. Dari sisi proses, Pilkada secara langsung melahirkan biaya politik tinggi.

Biaya itu tidak hanya terkait proses kampanye, tetapi juga terkait dengan proses-proses lain, seperti biaya "membeli perahu" yang akan mengantarkan calon dan biaya "pembelian suara" kepada sebagian pemilih.

Sebagai konsekuensi dari adanya efek negatif (by product) dari proses semacam itu, Pilkada secara langsung juga tidak serta-merta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Memang, yang terpilih tetaplah yang "terbaik". Namun, maknanya bukanlah "developmental leaders", melainkan terbaik karena kemampuannya di dalam "membiayai" proses-proses politik yang berbiaya tinggi itu. Maka, dalam konteks ini, Pilkada secara langsung juga telah melahirkan atau memperkuat oligarki di daerah.

Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK atau bermasalah secara hukum tidak lepas dari adanya proses-proses buruk semacam itu. Para kepala daerah itu berusaha menutup biaya yang dikeluarkan melalui praktik-praktik buruk di dalam tata kelola pemerintahan yang mereka pimpin. Yang lebih parah lagi, ada keinginan untuk memperoleh lebih untuk memupuk kekayaan pribadi di luar praktik legal.





Berangkat dari adanya sisi buruk dari Pilkada secara langsung seperti itu, belakangan terdapat keinginan untuk meninjau ulang. Pilkada secara langsung akan dikembalikan secara semula, yaitu dipilih kembali oleh DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara politik, bisa saja Pilkada dikembalikan ke sistem semula. Sepanjang DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU yang mengatur Pilkada, dan mengembalikan ke sistem semula, selesai. Tapi, apakah itu yang memang terbaik?

Pilkada secara langsung digagas bukan semata-mata sebagai mata rantai proses demokratisasi. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan adanya main mata antara calon dan anggota DPRD. Melalui Pilkada secara langsung, praktik buruk semacam itu diharapkan tidak terulang.

Ketika sekarang hendak dikembalikan ke sistem lama, bukankah itu merupakan cara menyelesaikan masalah dengan kemungkinan melahirkan masalah lain sebagaimana terjadi sebelumnya? Padahal, yang diinginkan adalah menyelesaikan masalah tanpa melahirkan masalah.

Memang, sistem apa pun sulit tanpa implikasi negatif. Dalam hal Pilkada secara langsung, salah satu masalah sentralnya adalah adanya biaya politik yang tinggi. Kalau hal demikian ini yang terjadi, bukankah hal itu bisa diatasi melalui, misalnya, pembatasan ambang batas maksimal biaya dari masing-masing calon secara terbuka? Kalau masih ada "votes buying", bukankah hal itu bisa diatasi melalui pemangkasan dari sisi "supply" yang ada di pihak calon dan timnya?



Memang, dalam hal tertentu, Pilkada secara langsung bisa jadi berkurang urgensinya. Misalnya, Pilkada di tingkat provinsi bisa saja ditiadakan melalui dua pertimbangan penting. Pertama, derajat otonomi daerah masih lebih banyak di kabupaten/kota. Wilayah provinsi ada di daerah-daerah otonom itu. Kedua, provinsi, selain memiliki otonomi tertentu, juga menjalankan fungsi sebagai "wakil pemerintah pusat" di daerah.

Ketika tidak dipilih secara langsung, gubernur/wakil gubernur itu apakah kembali dipilih DPRD provinsi? Tidak serta-merta demikian. Mengingat, secara politik, yang terkait dengan provinsi itu ada tiga pihak, gubernur/wakil gubernur itu bisa dipilih tiga pihak itu. Pertama adalah DPRD provinsi yang mewakili rakyat provinsi. Kedua adalah para bupati/wali kota yang merupakan para kepala daerah di daerah-daerah otonom di wilayah provinsi itu. Ketiga adalah pemerintah pusat. Sementara itu, nilai suara dari masing-masing pihak bisa didasarkan pada indeks kekuasaannya. Dengan demikian, perolehan pemenangnya tidak hanya akan ditentukan suara yang didapat, tetapi juga ketika ditransformasikan ke dalam indeks yang ditentukan.

Apakah bupati/wali kota bisa dipilih kembali oleh DPRD? Mengingat kedekatannya dengan rakyat, bupati/wali kota sebaiknya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam kasus khusus, bisa saja hal itu dilakukan. Selain pertimbangan keistimewaan, kasus khusus tersebut bisa saja dibuat. Misalnya saja, berdasarkan semacam "referendum" di daerah masing-masing. Ketika rakyat di daerah tersebut menghendaki pemilihan bupati/wali kota itu dilakukan oleh DPRD, bisa saja dilakukan.



Di Sulawesi Utara, proses pemilihan secara langsung mendapat sambutan baik dari masyarakat. Banyak yang menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses demokrasi yang baik karena sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada rakyat sebagai voters. Meski demikian, ada sisi negatif yang sering timbul, misalnya praktik kecurangan dari kandidat dengan *money politics*. Hal tersebut tidak mendidik rakyat sehingga mengaburkan kesungguhan demokrasi.



### C. Potret Pilkada Pertama di Sulut 2005

Pada tanggal 21 Juli 2005 untuk pertama kali di Indonesia dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung oleh rakyat, di mana berhasil terpilih pasangan Dr SH Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan F.H. Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk masa bhakti 2005 - 2010.

Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Drs. Syarial Damapolii yang dibantu oleh wakil ketua masing-masing Djendri Keintjem, R. Pandegirot, dan Arthur Kotambunan.

Sekretaris daerah selama periode pertama dipegang Dr. Johanis Kaloh lalu dilanjutkan Drs Robby J Mamuja pada tahun 2006. Menariknya di masa tugas Mamuja sempat ada Pelaksana tugas (Plt) Sekda Sulut berturut-turut yakni, HR Makagansa dan Siswa Rachmat Mokodongan.

Pada masa kepemimpinan Dr SH Sarundajang dan Freddy Sualang ketambahan empat kota dan kabupaten baru pada tahun 2007.

Antara lain, Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007, Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007, Kabupaten Bolmong Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007.

Pada tahun 2008 ketambahan lagi 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan



Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 sehingga jumlah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota.

Melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedua kali Dr SH Sarundajang terpilih sebagai Gubernur Sulut masa bakti 2010-2015 dengan Wagub Dr Djouhari Kansil, MPd.

Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Pdt Mieva Salindeho STh, dibantu wakil ketua masing-masing Jody Watung, Sus Pangemanan dan Arthur Kotambunan. Sedangkan Sekretaris Daerah dijabat Pelaksana tugas Ir Siswa Rachmat Mokodongan lalu dipegang Drs Robby J Mamuaja hingga 7 Maret 2011 dan dilanjutkan lagi oleh Ir Siswa Rachmat Mokodongan.

Selama hampir sepuluh tahun memimpin Sulut banyak sudah prestasi yang ditorehkan Sarundajang. Di antaranya mampu menggelar beberapa event bertaraf internasional. Misalnya, Word Ocean Conference (WOC), Sail Bunaken, CTI Summit dan beberapa event skala internasional dan nasional lainnya.

Prestasi lainnya beberapa kali Pemerintah Provinsi Sulut mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hingga saat ini slogan pemerintahan yang diusung yaitu, membangun tanpa korupsi belum tersandung satupun kasus.



## D. Sulut Masa Pilkada Serentak

Tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 mendatang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh, selain pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 7 Kabupaten/Kota, juga akan digelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

“Untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) ada Boltim, Bolsel, Minut dan Minsel. Untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) ada Manado, Bitung dan Tomohon. Serta ada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulut,” jelas Ardiles Mewoh kepada BeritaManado.com, 21 November 2019.

Ardiles Mewoh menambahkan, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah Rapat Koordinasi (Rakor) guna persiapan Pilkada dimaksud. “Saat ini kita sementara Rakor terkait kesiapan kedepan. Untuk tahapan-tahapannya yang baru dilaksanakan adalah penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – red) kemudian ada tahapan seperti pembentukan panitia, kemudian tahapan terkait calon perseorangan, tahapan pendaftaran pasangan calon, penetapan calon, kampanye, masa tenang hingga pemilihan,” ungkap Mewoh.

Gelombang Pilkada serentak di mana Sulawesi Utara ikut berpusar di tengahnya telah terkonsepsi sebelum 2015. Pada masa itu gulirannya diawali dengan kesepakatan berlangsung pada 3 etape, 2015, 2018 dan 2020. Namun



dalam perkembangan selanjutnya berkembang menjadi 7 etape pelaksanaan secara langsung dan serentak, pembukanya pada 2015 dan ujungnya pada 2027.

Setelah itu maka seluruh daerah di Indonesia bisa melakukan pemilihan kepala daerah pada waktu yang sama, baik tanggal, bulan hingga tahunnya.

Dari berbagai sisi Pilkada serentak telah mengambil takaran efisiensi yang lumayan besar, terutama dari masalah pembiayaannya. Apalagi ada acuan peraturan yang menata pemenang ditentukan dalam 1 putaran saja dengan ambang batas kemenangan 0 persen, atau tidak ada ambang batas persentase minimal. Artinya berapapun jumlah suara yang tertinggi maka yang bersangkutan adalah pemenangnya.

Kemudian kian berkembang pada 2024, Draf revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan elite partai politik, termasuk pula pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam draf tersebut. Draf RUU Pemilu dan Pilkada tersebut kini telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2021.

Sumber CNNIndonesia.com pada Januari 2021 memberitakan, salah satu yang dipersoalkan adalah aturan baru terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023. Aturan tersebut tidak ada dalam UU Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada 2024.



Beberapa fraksi menegaskan penolakannya terhadap usulan gelaran Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. PDIP dan PPP menyatakan menolak Pilkada digelar pada 2022 dan 2023 sesuai draf RUU Pemilu. Mereka sepakat Pilkada tetap digelar serentak pada 2024.

“Saya pikir di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kami Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU (Pemilu) belum relevan untuk diubah,” kata politikus PPP Nurhayati Monoarfa.

Begitu pula Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat yang menyatakan Pilkada tak perlu digelar pada 2022 atau 2023. Menurutnya, Pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan gelaran pemilihan legislatif dan presiden.

“Sebaiknya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Djarot.

Meski demikian, banyak fraksi di parlemen yang mendukung usulan agar Pilkada tetap digelar di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan draf RUU Pemilu. Fraksi yang mendukung di antaranya Nasdem, Golkar hingga Demokrat. Tak hanya soal jadwal Pilkada, salah satu poin dalam draf RUU Pemilu yakni pelarangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mencalonkan diri menjadi peserta pemilihan pemilu nasional dan daerah juga menjadi polemik. Beberapa pihak mendukung dan sebaliknya justru menolak keras.

Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Junimart Girsang mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurutnya,





setiap orang berhak maju menjadi peserta pemilu sepanjang pengadilan tidak mencabut hak politiknya.

“Sepanjang pengadilan tidak memutuskan siapapun setiap orang yang tidak dicabut hak politiknya di pengadilan maka dia berhak untuk maju,” kata Junimart.

Pendapat yang berlawanan turut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim. Luqman menilai HTI patut disetarakan dengan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini sudah dilarang dalam UU Pemilu.

“Tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara-bangsa,” kata Luqman.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada diundur ke November 2024. Hal itu diungkapkan Bahtiar menanggapi adanya usulan revisi atas Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar pada [kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com), 2 Februari 2021.

Adapun UU No. 10/2016 dalam pasal 201 ayat 8 mengamankan pemungutan suara serentak nasional dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

“Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara Indonesia pada tahun 2024,” kata dia.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 merupakan amanat UU yang perlu dilaksanakan, dan dievaluasi usai pelaksanaannya. Dengan begitu, evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah revisi perlu dilakukan atau tidak.

“UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, dievaluasi, hasil evaluasi itu lah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak, nah tetapi mestinya kita laksanakan dulu,” jelasnya.

Di sisi lain, dia menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah penanganan pandemi Covid-19, mengatasi berbagai persoalan dari aspek kesehatan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi. “Hari ini fokus utama kita adalah bagaimana bisa cepat mengatasi masalah Pandemi Covid-19, alhamdulillah sekarang ini sudah ada vaksin, itu prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan masyarakat dan warga negara kita, jadi tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan,” tutupnya.



## E. Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Pilkada 2020 mengalami penundaan terkait dengan adanya masa pandemic Covid-19 yang melanda dunia bahkan Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mengkonsultasikan rancangan perubahan tiga peraturan KPU yang akan digunakan dalam Pilkada 2020 kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami akan mengajukan draf perubahan tiga peraturan KPU,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Kamis, 12 November 2020.

Tiga rancangan PKPU itu ialah rancangan perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kemudian yang ketiga ialah perubahan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon. Menyangkut PKPU tentang pemungutan dan perhitungan suara, Arief mengatakan ada beberapa pasal yang direvisi. Di antaranya perubahan penggunaan dan penamaan formulir serta penyesuaian dalam beberapa tahapan dan tata cara penghitungan suara.



Adapun ihwal rekapitulasi hasil penghitungan suara, Arief mengatakan KPU mengusulkan penggunaan teknologi informasi atau yang dikenal sebagai Sirekap. Arief mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi ini dinilai penting untuk beberapa hal.

Pertama, kata dia, Sirekap akan membantu baik publik maupun penyelenggara pemilu untuk mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat. Kedua, Sirekap dinilai akan membuat proses rekapitulasi Pilkada 2020 akan berjalan lebih efektif dan efisien.

“Jadi penggunaan kertas yang selama ini cukup banyak itu akan bisa kami kurangi. Kemudian kebutuhan waktu yang selama ini cukup panjang itu juga bisa kami kurangi,” ujar Arief.

Arief mengatakan perubahan-perubahan tersebut tak menghilangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Kata dia, proses rekapitulasi tetap dilakukan di tiap jenjang. Yakni di tiap kecamatan dan kabupaten untuk pemilihan bupati dan wali kota dan di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur.

Ihwal PKPU untuk Pilkada dengan satu pasangan calon, Arief mengatakan ada beberapa perubahan lantaran menyesuaikan dengan dua PKPU di atas yang diubah.

“Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dua PKPU sebelumnya,” ujar Arief.

Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 sepenuhnya menggunakan standar protokol kesehatan



(prokes). Penyelenggara maupun pemilih harus patuh prokes di mana petugas KPPS menyediakan bilik khusus bagi warga yang ditemukan panas tubuhnya lebih dari 37 derajat.

## Nomor Urut

# 1

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara

**Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar**  
*Dalam debat publik antar-pasangan calon*





## Nomor Urut

# 2

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara

**Vonnie Anneke Panambunan dan Hendry Runtuwene**  
*Dalam debat publik antar-pasangan calon*





## Nomor Urut

# 3

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara

**Olly Dondokambey dan Steven Kandouw**  
*Dalam debat publik antar-pasangan calon*



# **BAB 3**

## **PILKADA DI ERA COVID-19**









## PILKADA DI ERA COVID-19

### A. Badai Pandemi dari Wuhan

#### 1. Kabar Mengejutkan Bagi Warga Saat Akhir Pekan

Hujan membasahi Kota Manado dan sekitarnya pada, Sabtu (14/3/2020), saat kabar mengejutkan itu datang. Beredar melalui berbagai aplikasi media sosial. Baik berupa potongan informasi, maupun foto. Pesannya singkat, tapi membuat penerimanya bak disambar petir. Pasien pertama Covid-19 di Sulut sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandouw Manado! Hingga menjelang sore hari, belum ada pihak berkompeten yang memberikan penjelasan.

Berbanding terbalik dengan kian masifnya informasi dan foto terkait kondisi pasien mulai dari saat dirujuk dari salah satu rumah sakit di Manado hingga dibawa ke RSUP Prof Kandou Manado. Upaya konfirmasi coba dilakukan sejumlah wartawan ke pihak RSUP Prof Kandou Manado. Akhirnya sore menjelang, Kepala Bidang Rekam Medik RS Prof Kandou Manado dr Handry Takasenseran memberikan penjelasannya. “Satu pasien di Rumah Sakit Prof Kandou Manado ini terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Handry, Sabtu malam 14 Maret 2020.



Handry mengungkapkan bahwa pasien yang positif terjangkit Virus Corona itu baru pulang beribadah di luar negeri. Saat pulang ke Manado pasien tersebut kesehatannya terganggu hingga kemudian dirujuk ke RSUP Prof Kandou Manado. “Sudah teridentifikasi waktu dirujuk ke RS Kandou pada 9 Maret. Kami sejak awal sudah masukkan untuk diisolasi,” Handry menjelaskan.



*Wawancara Kepala Bidang Rekam Medik RS Prof Kandou Manado, dr Handry Takasenseran saat menyampaikan kasus pertama Covid-19 di Sulut, Sabtu (14/3/2020).*

Saat berada di ruang isolasi rumah sakit terbesar di Indonesia Timur itu, kondisi pasien tersebut masih stabil. Meski begitu pihak rumah sakit akan terus memantau kondisi pasien tersebut karena dia masih mengidap beberapa penyakit lain. Handry berharap daya tahan tubuh pasien tersebut bisa terus meningkat agar bisa segera sembuh dari virus corona. Untuk penyakit penyerta itu



yang dilakukan pengobatan. Pasien akan dirawat hingga dinyatakan negatif Covid-19. Pasien yang dalam registrasi secara nasional dengan nomor 58 ini berjenis kelamin laki-laki, berusia 52 tahun.

Malam harinya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menggelar jumpa pers mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Sulut. Olly juga menunjuk dr Steaven Dandel MPH sebagai Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut. Suasana malam Minggu itu terasa kian mencekam saat pemberitaan di sejumlah televisi menyebutkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya terkonfirmasi positif Covid-19.

Sejak Senin (16/3/2020), setiap malamnya digelar jumpa pers di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut untuk memberikan informasi perkembangan kasus Covid-19. Ketika jumlah kasus kian meningkat, jumpa pers pun dilakukan secara online dan dibagikan siaran pers, untuk menghindari potensi penularan Covid-19.

## *2. Jokowi Umumkan Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia*

Beberapa pekan sebelum kasus pertama Covid-19 di Sulut, tepatnya pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit Virus Corona. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) itu sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi Virus Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

“Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona



berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan sebagaimana dilansir kompas.com. Dengan pengumuman itu, maka untuk kali pertama ada penemuan orang yang terjangkit virus corona di Indonesia.

Kementerian Kesehatan menduga sang anak tertular Corona saat berdansa dengan warga negara Jepang di sebuah klub di Jakarta pada 14 Februari lalu. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto menyebut, total ada 50 orang yang berdansa di acara itu. “Setelah selesai dansa kurang lebih 50 orang, dan itu multinasional, maka tanggal 16 Februari si wanita mengeluh batuk dan agak panas, kemudian berobat ke dokter,” kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yuri pun memastikan Kemenkes berupaya untuk melakukan tracking kepada semua orang yang ikut berdansa pada acara itu. “Kami tracking kelompok dansanya karena nationality-nya banyak warga beberapa negara, sedang kita tracking dengan pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia.

Saat diumumkan kasus pertama pasien Corona di Sulut pada Sabtu 14 maret 2020, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia berjumlah bertambah menjadi 96 kasus, 8 di antaranya dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia.

### *3. Ketika Mata Dunia Tertuju ke Wuhan*

Wuhan mungkin menjadi kota yang paling terkenal di daratan Tiongkok dalam satu tahun terakhir ini. Bahkan



‘popularitasnya’ bisa menyaingi ibu Republik Rakyat Tiongkok yakni Beijing. Salah satu kota terkuno dengan penduduk yang padat ini menjadi buah bibir masyarakat dunia akibat menyebarnya Virus Corona di ibu kota Provinsi Hubel itu. Dari daratan Tiongkok, Virus Corona kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia, dan menjadi isu paling penting dalam satu tahun terakhir.

Sebagaimana dilansir [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), satu tahun lalu tepatnya pada 1 Desember 2019 pasien pertama Virus Corona di Wuhan, China mulai menunjukkan gejala terinfeksi virus SARS-Cov-2. Sejak itu wabah tersebut telah meluas menjadi pandemi di dunia. Kasus pertama Covid-19 ditemukan oleh komunitas medis internasional di Wuhan, China, tapi asal pastinya masih belum diketahui dengan jelas.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan *The Lancet* pada akhir Januari, pasien pertama mulai menunjukkan gejala pada 1 Desember 2019, tapi pihak keluarga tidak pernah mengalami demam atau masalah pernapasan. Faktanya, para peneliti tidak dapat menemukan hubungan epidemiologis antara siapa yang mereka yakini sebagai pasien pertama dan kasus selanjutnya.

Infeksi virus corona yang seketika menjadi wabah memaksa pemerintah China menerapkan penguncian wilayah (lockdown). China bahkan sempat menjadi negara dengan kasus corona tertinggi di dunia, jauh sebelum virus corona menyebar ke seluruh dunia. Dilansir CBS8, Selasa 1 Desember 2019, selama konferensi pers pada Senin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkomitmen untuk menemukan asal-muasal penyakit tersebut guna mencegah



wabah serupa di masa depan. “Kami ingin tahu asal-usulnya dan kami akan melakukan segalanya untuk mengetahui asal-usulnya,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada jurnalis.

Namun, sebuah studi pemerintah yang baru diterbitkan menunjukkan bahwa Virus Corona mungkin telah mencapai AS beberapa pekan lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

Hingga pertengahan Maret 2020, wabah Virus Corona yang dimulai dari Wuhan, China, kian meluas ke seluruh dunia. Total 126.380 orang terinfeksi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan penyebaran Virus Corona menjadi pandemi.



## **B. Tantangan Menghantui Pilkada 2020**

### *1. Ramai-Ramai Mendaftar ke Parpol*

Euforia Pilkada di Sulut mulai menggemakan di penghujung tahun 2019, hampir bersamaan dengan munculnya kasus Covid-19 di Wuhan. Meski KPU Sulut belum mengeluarkan secara resmi tahapan Pilkada, namun partai politik (parpol) sudah mengambil langkah dengan membuka pendaftaran pasangan kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Para kandidat yang berniat maju sebagai kontestan Pilkada 2020 baik di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi mulai mendaftarkan diri di sekretariat parpol.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulut (PG) Christiany Eugenia Paruntu memulai langkahnya sebagai bakal calon gubernur (cagub) dengan mendaftarkan diri di Sekretariat PG Sulut, di Jalan Martadinata, Manado, Jumat 29 November 2019, sekitar pukul 16.15 Wita. Paruntu yang juga menjadi Bupati Minahasa Selatan Periode 2010-2020 ini diantar oleh ratusan pendukungnya dengan melakukan konvoi di sejumlah ruas jalan di Manado. Selain mendaftar di PG, Tetty sapaan akrabnya, juga mendaftar sebagai bakal cagub di DPW Partai NasDem Sulut. Ada 9 kursi Partai Nasdem di DPRD Sulut menjadi pertimbangan mengapa Tetty mendaftar di partai 'milik' Surya Paloh itu.





*Euforia para pendukung saat mengantar Christiany Eugenia Paruntu (CEP mendaftarkan di Partai Golkar Sulut, Jumat (29/11/2019).*

Langkah Tetty diikuti oleh Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar yang digadang-gadang sebagai calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Tetty. Sehan yang juga Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut ini, mendatangi Sekretariat PG Sulut, Senin 2 Desember 2019. Mengenakan jas berwarna biru datang bersama pengurus DPW PAN Sulut beserta rombongan. Mereka diterima oleh tim DPD I PG Sulut.

Setelah dari Kantor DPD I PG Sulut, Sehan bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kantor DPW Partai NasDem Sulut untuk mendaftarkan diri sebagai cawagub. Partai NasDem juga menjadi harapan bagi kandidat Gubernur Sulut lainnya Vonny Anneke Panambunan. Bupati Minahasa Utara ini bahkan memilih untuk naik bendi, sebuah kendaraan tradisional yang ditarik seekor kuda,



saat menyambangi Kantor DPW Partai NasDem Sulut, Senin (9/12/2019). Setelah menyerahkan dokumen saat pendaftaran, Vonny menyatakan, menjadi kewenangan DPP Partai NasDem untuk menentukan cagub. Namun dia optimis dipilih untuk bertarung di Pilkada 2020.

Jika kandidat cagub dan cawagub lain mulai mengambil langkah mendaftarkan diri ke parpol, tidak demikian halnya dengan PDI Perjuangan. Para kandidat dari partai berlambang banteng ini memilih untuk mengikuti petunjuk dari DPP PDI Perjuangan. Nama Olly Dondokambey disebut-sebut menjadi calon tunggal dari PDI Perjuangan. Gubernur petahana ini diwacanakan kembali berpasangan dengan Steven Kandouw.

Berbeda dengan kandidat bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, DPD PDI Perjuangan Sulut mengundang secara resmi sejumlah kandidat untuk mendaftarkan diri pada, Sabtu 7 Desember 2019.

## *2. Saat Pandemi Covid-19 Menghentikan Tahapan Pilkada*

Memasuki tahun 2020, eskalasi politik lokal di Sulut kian meningkat. Sejumlah kandidat bersiap diri untuk mengikuti tahapan resmi Pilkada yang dikeluarkan oleh KPU Sulut yakni pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di tengah persiapan memasuki tahapan tersebut, pandemi Covid-19 secara global dan di Indonesia kian meningkat.

Menyikapi situasi ini, KPU RI resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam



surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional. “Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020,” bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen SK KPU sebagaimana dilansir kompas.com, Minggu 22 Maret 2020.

Berdasarkan dokumen, setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Empat tahapan ini mestinya dilakukan selang Maret hingga Mei 2020.

Keputusan KPU RI itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan menggelar Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2020. Hasilnya disepakati untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Lantas bagaimana pelaksanaan tahapan Pilkada di Sulut? Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyatakan mendukung



penundaan Pilkada 2020. Pihaknya juga menunggu instruksi resmi selanjutnya dari KPU RI. Menurutnya, untuk alasan kemanusiaan yang jauh lebih penting, tentu tahapan Pilkada bisa ditunda. Sikap yang sama juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut Herwyn Malonda.

Malonda mengatakan, penundaan tahapan Pilkada atas alasan kemanusiaan karena pandemi Covid-19 adalah langkah bijak. Pihaknya juga menunda kegiatan pengawasan, dan memanfaatkan waktu untuk yang panjang bagi jajaran pengawas pemilu untuk meningkatkan kapasitas dengan mempelajari dan memahami regulasi.

### *3. Mengambil Risiko di Tengah Melonjaknya Kasus Covid-19*

Memasuki pertengahan tahun 2020, pandemi Covid-19 masih menghantui dunia. Bahkan grafik penambahan kasus baru terus meningkat. Hingga Rabu 27 Mei 2020, infeksi Virus Corona di seluruh dunia telah mencapai 5.588.400 kasus. Ada 2.286.879 kasus di antaranya telah dinyatakan sembuh.

Dalam kurun waktu yang sama, kasus Covid-19 di Indonesia juga melonjak drastis. Pada 27 Mei 2020 itu, ada penambahan 686 kasus baru, sehingga jumlah akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 23.851 kasus. “Dari hasil pemeriksaan ini konfirmasi kasus positif sebanyak 686 orang sehingga menjadi 23.851 orang,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu sore.



Dalam kondisi pandemi ini, berkembang wacana untuk menggelar kembali tahapan Pilkada 2020. Ada pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya. Namun di hari yang sama, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat tahapan Pilkada 2020 mulai dijalankan kembali pada 15 Juni mendatang. Pemungutan suara akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Kesepakatan terjalin usai Komisi II menyetujui perubahan Rancangan Peraturan KPU RI (PKPU) tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Salah satu hal yang disepakati adalah seluruh rangkaian tahapan Pilkada itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus corona yang ketat. KPU juga harus tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

Tahapan Pilkada 2019 yang akan dilanjutkan pada Juni yakni Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seterusnya.

Kemudian, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka pada 4-6 September. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Kemudian, penetapan pasangan calon kepala daerah 23 September. Tahapan kampanye berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember atau 71 hari.



Pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember secara serentak di 269 daerah sekaligus penghitungan suara di TPS. Dilanjut penghitungan suara di kecamatan pada 10-14 Desember, lalu penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember. Penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember.

Kesepakatan DPR RI, Mendagri, Bawaslu RI, dan DKPP RI, kemudian ditindaklanjuti di tingkat Sulut. Selasa (2/6/2020), KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi Internal dengan KPU kabupaten-kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 secara online. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh itu membahas persiapan pelaksanaan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020.



## C. Masyarakat yang Enggan ke TPS

### 1. Ormas Keagamaan Minta Pilkada Ditunda

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) menyerukan untuk menunda pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sebagaimana dilansir [kompas.com](http://kompas.com), PBNU menyatakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dengan berpijak pada satu konstitusi syariah yakni menjaga keselamatan jiwa setiap nyawa manusia.

“Imbauan PBNU merupakan seruan moral agar kita kembali mempertimbangkan bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah utama,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Helmy Faishal Zaini, Rabu 23 September 2020.

PBNU menilai, keselamatan nyawa manusia harus dijadikan patokan dasar dalam mengambil kebijakan. Apalagi, kata dia, saat ini kasus Covid-19 di Tanah Air dari hari ke hari semakin meningkat. Belakangan per harinya kasus Covid-19 seluruh Indonesia mencapai 4.000. Ditambah lagi, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Melihat kondisi tersebut, kata dia, PBNU menilai perlu ada alternatif apabila Pilkada 2020 dipaksakan tetap digelar. “Kalau kita melihat kondisi sekarang, PBNU memandang penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 kalau mau dipaksakan dengan model keteledoran kita sekarang, maka



dalam pandangan PBNU hendaknya kita semua punya alternatif baru untuk lakukan penundaan,” kata Helmy.

Ia mengatakan, penundaan pilkada tersebut harus dilakukan sampai dapat dipastikan bahwa situasinya memungkinkan dan aman apabila diselenggarakan. Namun, jika tetap dipaksakan di tengah pandemi, kata dia, harus dapat dipastikan bahwa tahapan rawan penularan Covid-19 yakni kampanye terbuka dan tatap muka langsung dihilangkan. “Apakah mungkin untuk hilangkan kampanye tatap muka digantikan dengan virtual? Kalau dimungkinkan setidaknya mengurangi 80 persen kemungkinan penularan. Meskipun masih menyisakan catatan bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan di bilik-bilik suara,” kata dia.

Adapun Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendapat desakan berbagai pihak untuk ditunda. Desakan tersebut berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang malah menunjukkan peningkatan signifikan setiap harinya. Selain PBNU, permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 juga disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sebagaimana dilansir [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), PP Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lantaran pandemi Virus Corona di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9/2020). “Untuk





menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilu 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan Pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” kata Mu’ti.

Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Mu’ti.



PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Jika usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bergema di tingkat pusat, di Sulut cenderung sepi. Minim pernyataan untuk menunda Pilkada. Di sisi lain Pemprov Sulut dan aparat Kepolisian yang secara intens menyuarakan pentingnya penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

## *2. Waspada Klaster Pilkada Penyebaran Covid-19 di Sulut*

Karena tampil sebagai kontestan dalam Pilkada Sulut 2020, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw harus cuti dari jabatan mereka. Pejabat di Kemendagri Agus Fatoni ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Sulut. Fatoni mengemban amanat ini dengan dua tugas utama yakni menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020, sekaligus penanganan pandemi Covid-19.

Dalam rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota di Sulut, Kamis (8/10/2020), Fatoni mengingatkan kepada semua kepala daerah agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah, terlebih memajukan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, menjaga agar jangan sampai terjadi klaster Pilkada.

“Posisi kepala daerah selain sebagai kepala daerah sebagai pemimpin, juga banyak tanggung jawab yang diberikan kepada kita,” ujar Fatoni saat memimpin rapat yang dihadiri para bupati dan wali kota di Sulut, Kamis 8 Oktober 2020.



Pertemuan ini merupakan kegiatan tatap muka perdana Fatoni dengan seluruh bupati dan wali kota di Sulut sejak dia dilantik sebagai Pjs Gubernur Sulut pada bulan September 2020. Terkait agenda nasional yakni Pilkada, Fatoni mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tetap dijalankan sesuai jadwal yang diberikan.

Dia pun meminta agar setiap pejabat daerah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masing-masing daerah sehingga tidak terciptanya klaster baru di Sulut.

“Pilkada Sulut tetap dilaksanakan dengan usaha keras dengan tidak adanya klaster Pilkada. Karena itu tugas kita bersama, mari kita kawal Pilkada ini agar aman sukses dari Covid-19,” ujarnya.

Tak hanya pemerintah yang was-was terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Muhammad Alhamid mengingatkan hal ini saat berkunjung ke Sulut.

“Pilkada saat ini kita laksanakan di tengah pandemi Covid-19. Ini tidak sama dengan situasi normal,” ujar Muhammad usai kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Bawaslu di Manado, Jumat 6 November 2020.

Muhammad mengingatkan agar standar protokol Covid-19 dalam tahapan Pilkada harus benar-benar dilakukan dan ada pengetatan penerapan standar kesehatan secara serius. Sehingga jangan sampai muncul klaster baru penyebaran Covid-19, termasuk di Sulut.



“Kita tidak mau menjadi klaster baru lahirnya sejumlah korban Covid-19,” ujar Muhammad didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut Herwyn Malonda.



*Wawancara Ketua DKPP RI Muhammad Alhamid usai kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Bawaslu di Manado, Jumat (6/11/2020)*

Terkait pelaksanaan protokol Covid-19, Malonda mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, sebagian besar persoalan muncul di luar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Artinya protokol Covid-19 yang bermasalah itu di luar kegiatan.

“Bukan di dalam kegiatan, tetapi di seputaran kegiatan itu yang banyak orang. Karena di lokasi kegiatan diterapkan protokol kesehatan,” ujar Herwyn.

Dia mengatakan, untuk mengantisipasi kondisi seperti itu pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong



Praja, Kepolisian dan TNI untuk menertibkan keberadaan massa di sekitar lokasi kegiatan. Selain itu Bawaslu Sulut juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan penanganan. “Setiap 10 hari kita lakukan evaluasi, hasilnya memang dugaan pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Sulut sudah mulai berkurang,” kata Herwyn.

### *3. Ketika Para Penyelenggara Pilkada Terpapar Covid-19*

Di tengah upaya pemerintah dan penyelenggara Pemilu mempersiapkan Pilkada 9 Desember 2020 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, kabar mengejutkan datang. Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19!.



*Kotak suara yang dibawa ke pulau-pulau di Sulut.*



“Memang Mas Arief Ketua KPU RI terpapar terinfeksi Covid-19 pada tanggal 18 dari hasil swab test saat ingin persiapan rapat di Istana. Karena positif kemudian Mas Arief menghubungi kita dan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas,” tutur Komisioner KPU Viryan Aziz, Sabtu (19/9/2020), sebagaimana dilansir Liputan6.com.

Dia mengatakan, selama pandemi Covid-19, aktivitas KPU telah melakukan adaptasi dengan cara bekerja dari rumah atau work from home (WFH). “Karena Mas Arief itu OTG, beliau masih badannya sehat dan tidak ada halangan yang berarti, namun tetap kita waspada,” ujar Viryan.

Dia mengungkapkan, sebelum Ketua KPU Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19, dia sempat menemani dalam kunjungan kerja ke Kota Depok dan Kota Makassar. “Kunjungan terakhir, ke Depok dan Makassar, ke Makassar untuk penandatanganan MoU,” kata Viryan.

Arief menjalani karantina mandiri di rumah. Kendati begitu, dia mengaku masih menjalankan tugasnya dengan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Tak hanya di tingkat pusat, melainkan di Sulut juga beredar kabar sejumlah penyelenggara Pilkada yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif Covid-19 setelah melalui rapid test.

Sebagaimana dilansir beritakawanua.com, berdasarkan data yang diperoleh dari petugas PCR Mobile Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado, dari 7.987 petugas KPPS Kota Manado yang menjalani rapid test, terdapat 1.038 yang dinyatakan reaktif.



“Iya, ada 1.038 orang yang dinyatakan reaktif dan langsung dilakukan Swab Test,” ujar Cendy Wokas, petugas PCR Mobile Dinas Kesehatan Kota Manado, Rabu 18 November 2020.

Pelaksanaan rapid test bagi anggota KPPS Kota Manado memang sudah dilakukan sejak 5 November 2020 dan akan berakhir pada 16 November 2020. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Kota Manado bebas dari Covid-19.

“Rapid tes yang diambil dari seluruh petugas KPPS Manado untuk memastikan para petugas yang akan melayani masyarakat dalam proses pemungutan suara aman dari Covid-19,” kata Cendy.

Data tersebut membuat Dinkes Kota Manado terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Sulut guna penanganan lebih lanjut jika ditemukan adanya gejala dari hasil tes swab.

Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda memberikan solusi untuk dilakukan pergantian petugas KPPS. Tapi jika tidak memungkinkan, KPPS yang sehat melaksanakan tugas rangkap. “Paling sedikit harus ada lima orang KPPS dalam satu TPS,” ujarnya.

Meski demikian, Malonda tetap mengajak masyarakat pemilih di Sulut untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada Rabu 9 Desember 2020, pukul 07.00-13.00 Wita.

Menanggapi informasi adanya ribuan anggota KPPS yang reaktif Covid-19, Komisioner KPU Manado Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Partisipasi Masyarakat



(Parmas) Ismail Harun mengatakan, tidak ada penggantian KPPS. Walau hasil swab test positif, para petugas KPPS tidak bisa digantikan karena tidak ada dalam aturan.

“Regulasi pergantian itu sendiri tidak ada. Tetap mereka. Yang pasti, ketika mereka sudah sembuh dengan mendapatkan keterangan dari Puskesmas, mereka bisa diaktifkan,” jelasnya sebagaimana dilansir beritakawanua.com.

Tak hanya di Manado, di beberapa daerah juga dilaporkan adanya petugas KPPS yang reaktif Covid-19. Manadopost.id melansir, sebanyak 91 anggota KPPS reaktif hasil rapid test. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Elysee Sinadia, saat memberikan materi pada kegiatan Media Ghaterring, di Tahuna, Kamis 19 November 2020).

Menurut dia, hasil reaktif yang disampaikan baru data sementara sebab belum semua hasil rapid test yang diterima oleh KPU. “Sebanyak 91 anggota yang dinyatakan reaktif, ini baru hasil untuk tujuh kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Sangihe,” jelasnya.

Dia mengatakan, masih menunggu informasi dari rumah sakit terhadap hasil rapid test anggota KPPS di delapan kecamatan. Dan anggota KPPS yang reaktif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan usap tenggorokan atau swab.

“Anggota KPPS yang reaktif segera dilanjutkan dengan pemeriksaan swab guna memastikan apakah mereka terpapar Covid-19 atau tidak,” ujarnya. Sebelum dilakukan pemeriksaan swab, anggota KPPS yang reaktif diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri. “Kami mengimbuu semua





anggota KPPS yang reaktif agar melakukan isolasi mandiri di rumah,” ujar Sinadia.

Daerah lainnya di Sulut yang melaporkan adanya petugas KPPS yang reaktif Covid-19 hasil rapid test adalah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bolaang Mongondow dr Debby Chintya Dewi Kulo mengumumkan 11 anggota KPPS reaktif dari hasil rapid test pada, Sabtu 5 Desember 2020.

Informasi banyaknya petugas KPPS yang merupakan garda terdepan dalam proses pemungutan suara yang reaktif Covid-19 membuat kekhawatiran warga meningkat. Banyak yang memilih enggan memberikan hak suaranya atau golput saat pencoblosan 9 Desember 2020.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Dr Ferry Daud Liando mengatakan, golput itu sebuah fenomena yang sering terjadi baik dalam setiap pemilu atau Pilkada.

Golput terjadi karena beberapa sebab, pertama ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang sedang berkompetisi dan banyak pemilih yang trauma karena banyak janji-janji politik yang tidak dibuktikan ketika terpilih.

“Ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka enggan untuk datang memilih. Kemudian, karena kondisi sebagian masyarakat yang kini hidup dalam kondisi zona nyaman. Artinya memilih atau tidak memilih baginya tak akan mempengaruhi nasib. Golput terjadi karena sebagian masyarakat lebih tertarik untuk bekerja ketimbang untuk datang memilih. Pilkada tahun ini kemungkinan potensi



masyarakat untuk tidak memilih bisa saja naik,” ungkap Liando sebagaimana dilansir rri.co.id.

Menurutnya, alasan untuk tidak memilih karena takut tertular Covid-itu sangat manusiawi. Kemungkinan masyarakat yang akan datang memilih ke TPS pada 9 Desember adalah pertama masyarakat yang berhasil diperdaya oleh calon dengan money politics. Jadi uang suap itu bisa menjadi daya dorong masyarakat untuk datang memilih. Lalu masyarakat yang diancam atau terintimidasi.

Mereka sebagian besar adalah ASN dan keluarganya atau pemimpin agama dan keluarganya. “Jadi mereka yang memilih datang ke TPS karena takut kehilangan jabatan atau takut tak mendapat fasilitas dari pemerintah, masyarakat yang dipengaruhi politik aliran,” ujarnya.

Liando mengatakan, KPU harus bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa suasana TPS itu aman dari Covid. Hanya dengan cara itu maka masyarakat akan datang ke TPS. Perlu inovasi bagi KPU dalam mensosialisasikan Pilkada aman dari Covid-19.

## **BAB 4**

# **POTRET PILKADA SULUT 2020**







## POTRET PILKADA SULUT 2020

**H**ari-H Pilkada serentak, 9 Desember 2020, adalah ujian sesungguhnya bagi jajaran KPU di Sulawesi Utara. Alasannya bukan hanya itu adalah final dari puluhan tahapan yang telah mereka gulir selama berbulan-bulan. Pilkada kali ini sungguh 'istimewa' karena pesta demokrasi bagi 2.506.981 Jiwa tahun 2019/BPS Sulut, rakyat Bumi Nyiur Melambai akan dirayakan di tengah pandemi.

Badai pandemi Covid-19 dari Tiongkok telah meluluhkan perekonomian global. Dampaknya langsung terasa di Sulut. Tatkala upaya pemerintah pusat dan daerah memacu akselerasi ekonomi, membujuk masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah hingga masalah sosial lainnya bermunculan, justru di saat itulah proses berdemokrasi lewat pemilihan kepala daerah serentak berlangsung. Maka tantangan serius ini yang dihadapi para komisioner KPU Sulut; Ardiles Mewoh, Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Lanny Ointu dan Salman Saelangi.

Jajaran KPU di Sulut, bahkan daerah-daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, mulai berhitung apa saja kendala yang rawan dihadapi dalam situasi tak normal. Risiko terbesar adalah ketakutan memilih untuk datang ke lokasi-lokasi tempat pemungutan suara.



Pandemi tahun 2020 telah menciptakan krisis kepercayaan di tengah masyarakat. Ini dimungkinkan karena Covid-19 merupakan wabah asing dan masih diraba-raba pola penyebarannya, sehingga memicu banyak pendapat meminta Pilkada kali ini ditunda saja hingga situasi normal. Risiko terburuk pasca-Pilkada adalah terciptanya klaster baru gara-gara kumpulan ratusan pemilih di satu titik.

Aparat kepolisian juga menjadi pihak yang bersiaga menunaikan tugas dengan misi besar bertajuk Pilkada Sehat. Tiga bulan sebelum hari pencoblosan, Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra memimpin rapat bersama dengan penyelenggara Pemilu dan stakeholders terkait, di aula Ditlantas Polda Sulut.

Dalam rapat tersebut, Kapolda mendorong sekaligus mengajak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh peserta Pilkada di Sulut agar melaksanakan tahapan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Kapolda meminta penyelenggara maupun seluruh peserta Pilkada dan masyarakat Sulut mematuhi Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020.

“Kita minta kepada semua pihak agar mematuhi Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masa Pilkada Serentak ini,” kata dia sebagaimana diberitakan Liputan 6.com, 16 September 2020.

Kekhawatiran mencuat karena pada momen pendaftaran pasangan calon di kantor KPU, banyak temuan pelanggaran terutama terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Padahal dalam Peraturan KPU sudah diatur bagaimana teknis pelaksanaan Pilkada dengan tetap memperhatikan



pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Peraturan KPU ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh pasangan calon dan semua penyelenggara pilkada ini, dengan memperhatikan upaya penyebaran Covid-19 selama masa pelaksanaan pilkada,” kata Panca Putra. “Harus ada sanksi tegas dan mendidik agar masyarakat patuh terhadap Peraturan Daerah di Sulut, khususnya dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” tambah dia.

Tapi bagaimanapun juga, tugas besar Ardiles Mewoh dkk mengamankan Pilkada serentak Sulut 2020. Kita ketahui bersama, Pilkada 9 Desember 2020 di Indonesia tetap berlangsung di tengah badai pandemi. Tak ada klaster baru selepas suksesi provinsi dan kabupaten/kota itu.

Justru di Sulawesi Utara, tanah yang sejak masa purba telah menjadi penanda bagaimana proses berdemokrasi memilih pemimpin, kelompok penyelenggaranya telah menorehkan sejarah baru.



## A. Langkah KPU Merayu Pemilih

9 Desember 2020, beberapa menit lagi waktu akan menuju ke pukul sebelas siang saat Vonny Anneke Wowor melangkah keluar dari TPS 2 Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Sebelumnya, ibu rumah tangga berusia 60-an tahun itu telah mempelajari bagaimana prosedur menyalurkan hak suara yang dibuat untuk meredam penularan wabah Covid-19. Di TPS, dia mempraktikkan apa yang telah dipelajari sebelumnya itu.







*Warga memberi hak suara meski saat pandemi Covid-19.*

“Sebenarnya sempat khawatir untuk datang ke TPS, tapi setelah melihat kesiapan penyelenggara hingga prosesnya di lapangan saya jadi tak ragu lagi untuk datang mencoblos pilihan kepala daerah,” katanya meyakinkan.

Prosedur tersebut memang ketat. Katadata.co.id melansir, pada hari pencoblosan, pemilih diminta menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak 1 meter sebelum masuk dan keluar dari TPS.

Selanjutnya pencoblosan diharuskan untuk mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun serta menggunakan masker yang tepat. Antara pemilih dan petugas pun tidak bisa melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun di area TPS.





*Salah satu TPS di Kota Manado tengah menggelar proses pencoblosan. Nampak ada anggota KPSS yang siaga dengan baju Hazmat mengacu pada Protap penanggulangan Covid-19 di masa Pilkada.” (sumber: dokumentasi Panwas Kecamatan Singkil).*

Sedangkan langkah yang harus dilakukan oleh KPSS adalah: KPSS dan Petugas Ketertiban selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Lalu, petugas ketertiban yang bertugas di pintu masuk TPS memeriksa suhu tubuh KPSS, saksi, pengawas atau pemantau dan pemilih sebelum masuk ke area TPS dengan thermogun.

Pengawas maupun petugas lain yang suhu tubuh melebihi 37,3 derajat selsius, masuk kebilik khusus dengan dilayani oleh TPS 6 yang menggunakan baju Asmad.

Adapun dalam proses pemungutan suara telah diatur pemilih antre di luar dengan memperhatikan jarak aman. Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker.

Selanjutnya petugas mengecek suhu tubuh, pemilih mengisi formulir Model C Daftar Hadir-KWK setelah menunjukkan Model C Pemberitahuan-KWK serta KTP elektronik kepada KPSS 4. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran. Selama menunggu, pemilih disediakan kursi dengan tetap menjaga jarak. Ketua KPSS kemudian memanggil pemilih untuk mengambil surat suara.

Pemilih menggunakan hak pilih dengan alat coblos yang telah disediakan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan, dalam hal ini akan dipandu oleh KPSS 6. Pemilih membuka sarung tangan, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan.



Sebelum keluar, KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahu pemilih wajib mencuci tangan dan bila telah selesai menggunakan hak pilihnya, diimbau untuk meninggalkan area TPS.

Malam sebelumnya, proses pendistribusian material pemilihan yang berlangsung di kantor Kelurahan Bitung Karangria juga ketat mematuhi Protap penanggulangan Covid-19. “Ini sesuai imbauan yang berkali-kali disampaikan pemerintah daerah dan jajaran KPU,” cetus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tuminting, Basyarudin Kyai Demak. Tak heran Basyar, begitu lelaki simpatik ini biasa disapa, tak mau kecolongan dan memantau langsung penyerahan kotak suara dari PPS ke KPPS.

Seluruh penyelenggara, termasuk tim pengawas kelurahan, diminta mengukur suhu tubuh, memakai masker serta dilengkapi cairan pencuci tangan. Protap tetap dilakukan seterusnya, selepas pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Para penyelenggara di berbagai tingkatan, termasuk saksi dan aparat kepolisian yang berjaga, terus menggunakan masker selama masa itu.

Pola taktis digunakan KPU Sulut untuk ‘membujuk’ pemilih agar datang ke TPS pada hari-H. Ketakutan masyarakat harus diredam, caranya dengan dengan menegakkan Protap penanggulangan Covid-19. Tidak hanya pemilih, kelompok penyelenggara lapangan juga diamankan demi mewujudkan Pilkada sehat. “Ada ribuan petugas KPPS sudah jalani rapid. Jika reaktif, apalagi positif, mereka tentu tak bisa bertugas,” ujar Komisioner KPU Sulut Bidang



Hukum dan Pengawasan, Meidy Yafeth Tinangon, dilansir Tribunnews Manado, 27 November 2020.

Proses pemeriksaan kesehatan itu terpantau 2 pekan sebelum 9 Desember pada sejumlah kantor kelurahan di Kota Manado. Di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, petugas medis dari Puskesmas selaku pelaksana melakukan rapid-tes terhadap ratusan personil KPPS. Menyikapi temuan hasil reaktif, personil bersangkutan wajib berlanjut ke pemeriksaan SWAB. Basyarudin selaku Ketua PPK Tuminting juga terus mengawal prosedur tersebut.

Berbagai protokol kesehatan wajib dijalankan mengacu Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid. Terkait itu, ada kekhawatiran potensi terjadinya kerumunan pada hari H, 9 Desember 2020. Menurut Meidy, belajar dari pengalaman, kerumunan biasanya terjadi di pagi dan siang hari jelang pemungutan suara ditutup. Pemilih tak langsung pulang tapi berkumpul di sekitar TPS atau di rumah-rumah warga, menunggu hingga pembacaan rekapitulasi penghitungan suara.

Terkait kekhawatiran ini, Meidy mengatakan telah mengantisipasinya dengan mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Waktu memilih dicantumkan di Formulir C Pemberitahuan atau undangan.

“Di situ sudah ada jam kapan dia datang,” sebut dia. Karena itu, KPU menyarankan setiap TPS menggelar live streaming pada saat penghitungan suara sehingga masyarakat bisa memantau dari rumah. Yang boleh ada di TPS menurut dia hanya KPPS, saksi dan pengawas TPS.



Bahkan sedari proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan Bulan Agustus 2020, para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP naik turun rumah dengan seragam yang dilengkapi pengaman. Hal mana menunjukkan KPU Sulut siap mengamankan suksesi kepala daerah di tengah pandemi, menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, mewujudkan Pilkada sehat.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mario Revelino Mewoh dalam berbagai kesempatan meminta masyarakat agar jangan takut datang ke TPS. Salah satunya dia sampaikan ketika membuka debat publik putaran ketiga untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, 17 November 2020.

“Kami sebagai penyelenggara pemilihan, telah menggelar debat publik. Di sini masyarakat yang melihat sendiri visi dan misi calon. Andalah yang menentukan pilihannya. Tidak usah khawatir datang ke TPS,” cetus Ardiles.

Menyangkut hal ini, Media online satubmr menulis, Ardiles menyatakan KPU telah menyiapkan TPS yang dapat mengantisipasi penularan Covid-19, sehingga aman bagi warga untuk datang mencoblos nanti.

Protap Penanggulangan Covid-19 telah ditegaskan KPU Sulut dan seluruh kabupaten/kota ketika melantik jajaran Panitia Pemungutan Suara, yang berjumlah 5.517 orang, tersebar pada 1.839 Desa dan Kelurahan.

“Untuk pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak pada hari ini Senin, 15 Juni 2020 dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan cara virtual atau daring dan ini boleh dibilang sukses walaupun



ada beberapa anggota PPS yang desanya masih terkendala dengan jaringan internet, tapi berbagai upaya mereka lakukan ada yang naik ke gunung bahkan ada yang ke pinggir pantai hanya untuk mencari signal internet agar bisa ikut dalam pelantikan tersebut,” jelas komisioner Salman Saelangi yang membidangi Divisi SDM dan Parmas.

Salman turut memastikan, seluruh kegiatan yang dilakukan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.



*KPU Sulut saat melakukan sosialisasi pencoblosan.*

“Pola yang kami lakukan di masa pandemi Covid-19 ini, untuk setiap kegiatan kami batasi peserta yang hadir,” kata dia. KPU Sulut patuh dalam melaksanakan prokes guna membantu pemerintah memutus mata rantai pandemi. “Kita tidak ingin kegiatan Pilkada ini menjadi klaster penyebaran Covid-19,” cetus Salman.

Tak terlepas dari upaya KPU Sulut untuk menghadirkan pemilih ke TPS adalah bagi para pasien Covid-19 itu sendiri. KPU memastikan pasien Covid dapat menunaikan haknya untuk memilih.



*Warga yang berada di rumah sakit tetap antusias memberikan hak suara.*

“Kami sudah koordinasi dengan RS, tapi untuk pasien Covid-19, KPPS kita tidak bisa semua masuk ke dalam, jadi dibantu oleh perawat yang mengisi formulir C-pendampingan. Dan disini ada 11 pasien Covid-19 yang memenuhi syarat untuk memilih,” kata Komisioner Divisi Teknis, Yessy Yatty Momongan, pada manadopost.jawapost.com, awal Desember 2020.

Setidaknya ada 11 Pasien Covid-19 yang bisa mencoblos di RSUP Prof Kandou Malalayang Manado. Pada situasi tersebut, Komisioner Divisi Data Lanny Anggriany Ointu juga memastikan untuk pendataan pasien telah dikoordinasikan bersama pihak rumah sakit. “Kami telah berkoordinasi, data pasien ini sifatnya rahasia tapi untuk kepentingan Pilkada untuk dicek apakah sudah ada di daftar atau belum, jika sudah kami keluarkan C-5 atau pindah memilih. Dan ada yang di beberapa rumah sakit dan tempat isolasi di Kota Manado,” kata Lanny.



Dari sisi teknis, prosedur pencoblosan untuk pasien Covid-19 telah diperkuat dengan pernyataan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono MS. Menurut Tri, selama petugas menggunakan APD lengkap untuk melayani hak pilih pasien Covid-19 dalam Pilkada 2020, tidak akan memperbesar risiko penularan Covid-19.

“Ya kan petugas sudah pakai baju proteksi lengkap, baju hazmat, jadi tidak masalah. Tidak akan memperbesar risiko penularan,” ujar Tri pada Suara.com, 3 Desember 2020.

Kedatangan petugas KPU, menurut Tri, tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemulihan pasien Covid-19 untuk sembuh. Hanya saja, pasien yang dalam keadaan tidak sadar alias koma, akan sulit menyalurkan hak suaranya karena tidak bisa memilih. “Pasien Covid-19 yang ringan pakai TPS sendiri jangan dicampur dengan yang lain, terutama yang masyarakat isolasi mandiri harus terpisah,” kata dia.



*Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) saat mencoblosan.*





## **B. Hasil yang tak Terbayangkan**

Senin pagi, 15 Februari 2021, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Istana Negara. Keduanya terpilih berdasarkan hasil Pilkada 9 Desember 2020. Di hari yang sama Presiden juga melantik pasangan pemimpin untuk Provinsi Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP, juga merupakan produk Pilkada 2020. Pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden oleh Presiden Joko Widodo kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut di Istana Merdeka dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan. Olly dan Steven disahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden Jokowi mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada masing-masing pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Pilkada Sulawesi Utara 2020 pun sukses dilaksanakan, kendati bergulir di tengah pandemi. Bagi KPU Sulut,



tentunya hal tersebut menjadi capaian yang melegakan, tetapi juga menggemirakan. Kekhawatiran bahwa pemilih akan menyusut akibat terpaan Covid-19 ternyata tak terbukti.

Faktanya, ada 1.462.605 rakyat Sulawesi Utara datang ke TPS menyalurkan hak suara mereka.

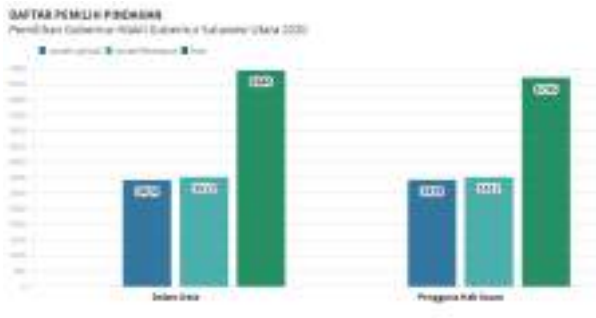


Table 1 : Model D.Hasil Provinsi-KWK / KPU Sulut 2020

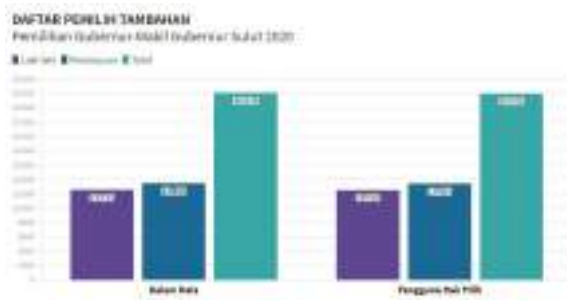


Table 2 : Model D.Hasil Provinsi-KWK / KPU Sulut 2020



Melihat akumulasi jumlah daftar pemilih tetap, angka pemilih tambahan dan pemilihan pindahan sebanyak 1.864.883, berarti persentase yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 sebesar 78 persen.

“Bahkan di atas target nasional sebesar 77,5%. Ini tentu membanggakan,” kata Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh.

Target partisipasi pemilih di Pilkada 2020 secara nasional sebelumnya ditetapkan sebesar 77,5 persen. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pembandingan Pilkada 2020 ialah Pilkada 2015, mengingat gelaran ini merupakan siklus dari pemilihan lima tahun silam. Ketika itu, partisipasi masyarakat sebesar 68,82 persen.

“Karena Pilkada 2020 ini kan sebetulnya melaksanakan dengan jumlah yang sama dengan yang menyelenggarakan Pilkada 2015, kecuali ada satu tambahan yang mengulang kembali yaitu Kota Makassar,” ucap Arief dilansir Tempo.co.

KPU mengungkap tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 76,09 persen. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih Pilkada 2020 yang dihitung dengan cara, rata-rata partisipasi pemilih dibagi 269 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara pilkada, minus Kabupaten Boven Digoel.

“KPU melakukan penghitungan tingkat partisipasi pemilih rata-rata untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota berdasarkan data resmi pada tingkat kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Wiarsa melalui keterangan tertulisnya yang



diberitakan Kompas.com, 31 Desember 2020.

Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tingkat partisipasi rata-rata mencapai 69,67 persen. Sementara pada pemilihan bupati dan wakil bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52 persen. Sedangkan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04 persen.

Jika dirincikan tingkat partisipasi pemilih masing-masing daerah penyelenggara Pilkada 2020 bervariasi dengan yang tertinggi adalah Sulawesi Utara berada di posisi pertama dengan persentase sebesar 81,83 persen. Selanjutnya Provinsi Bengkulu 79,69 persen dan Provinsi Kalimantan Utara 74,67 persen.

“Ada 130 daerah yang capaian partisipasi pemilihnya melebihi target nasional. Jika dirinci, daerah pemilihan gubernur yang melebihi target nasional ialah Sulawesi Utara 81,83 persen dan Bengkulu 79,69 persen,” ujar Arief Budiman, dikutip Tempo.co 17 Desember 2020.

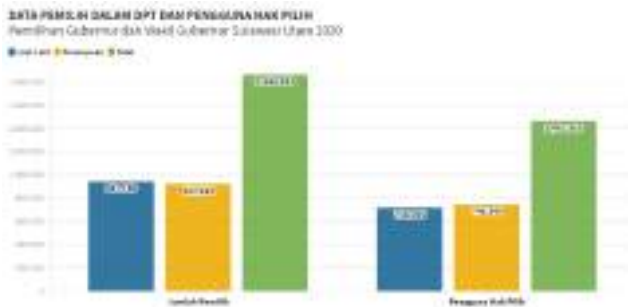


Table 3 : Model D.Hasil Provinsi-KWK / KPU Sulut 2020

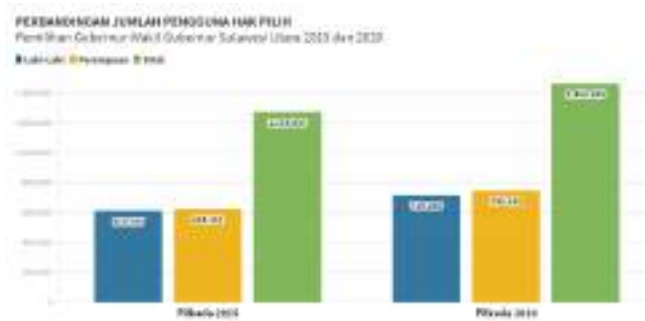


Table 4 : Model D.Hasil Provinsi-KWK, Website KPU Sulut / KPU Sulut 2020

Bahkan bila dibandingkan dengan hasil Provinsi Sulawesi Tengah yang juga menggelar Pilkada Gubernur, jumlah suara yang direkapitulasi sebanyak 1.525.571 suara. Situs berita Antara menyampaikan sebagai pembanding, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.484.172 pemilih, terdiri dari laki-laki 732.026 pemilih dan perempuan 752.146 pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih 8.314 pemilih dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP-el atau surat keterangan (DPTb) 33.085 pemilih.

Sedangkan total jumlah pemilih yang terdaftar di DPT model A.3-KWK sebanyak 2.022.191 pemilih. Dengan begitu, partisipasi pemilih berada di angka 74,5 persen. “Dibandingkan Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih hanya 69 persen, dan di Pilkada ini justru naik drastis berada di angka 74,5 persen,” kata Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming.



Capaian maksimal yang diraih KPU Provinsi Sulawesi Utara telah memupus kecemasan banyak pihak yang mengira target nasional 77,5 % sebagai sesuatu yang sulit di masa pandemi.

“Di masa tidak pandemi pun cukup sulit mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya di pilkada, dan bisa semakin sulit di tengah situasi pandemi yang kita hadapi,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini, pada detik.com 18 Juni 2020.

Titi mengatakan, di negara-negara yang menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi mengalami masalah penurunan partisipasi pemilih. Hal ini karena masyarakat ragu dengan keamanan dan keselamatan.

“Mayoritas negara-negara yang menyelenggarakan agenda pemilu di masa pandemi mengalami problem penurunan partisipasi pemilih yang cukup signifikan, akibat masyarakat yang merasa tidak yakin dengan keamanan dan keselamatan mereka ketika harus berpartisipasi di pemilu di tengah masih tingginya ancaman penyebaran Covid-19,” kata Titi.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, menurut dia, mayoritas lebih rendah dari Pemilu. Hambatan menaikkan tingkat partisipasi dinilai bertambah bila masyarakat menganggap Pilkada bukan menjadi prioritas saat ini.

“Pengalaman kita selama ini angka partisipasi pemilih di Pilkada mayoritas lebih rendah daripada partisipasi pemilih di Pemilu nasional, baik legislatif maupun presiden. Dan hambatan itu makin besar apabila masyarakat menganggap, Pilkada bukan lah prioritas bagi mereka yang saat ini sedang terdampak kondisi ekonominya akibat Covid-19



dan lebih mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang berpartisipasi di Pilkada,” kata Titi.

“Selain itu kalau pemilih, khususnya di daerah-daerah zona merah masih beranggapan mereka tidak terlalu bisa dijamin keamanan dan kesehatannya dalam berpartisipasi di Pilkada. Maka sangat mungkin akan ada kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilih, daripada membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” sambungnya.

Bila waktu pelaksanaan Pilkada tidak dapat diundur kembali maka KPU perlu bekerja maksimal dalam meyakinkan pemilih. Hal ini dengan cara, profesionalisme dengan menunjukkan dapat menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kalau memang KPU tidak bisa dan sama sekali tidak memberi alternatif untuk kembali lagi memundurkan Pilkada agar bisa punya waktu, persiapan, dan mitigasi risiko, serta antisipasi yang lebih baik. Maka mau tidak mau KPU dan semua pihak yang punya otoritas dan kepentingan harus bekerja keras, untuk meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada.

KPU harus semaksimal mungkin menunjukkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalismenya kepada publik bahwa mereka mampu menyelenggarakan Pilkada yang sehat, yang sejalan dengan protokol penanganan Covid -19 dan partisipasi pemilih sama sekali tidak akan membuat mereka terpapar Covid -19,” tutur dia.

KPU RI sendiri tak menyangka ada sejumlah daerah yang mengelat Pilkada di Indonesia bisa melewati angka rata-



rata yang ditetapkan sebagai target nasional. Arief Budiman menyatakan, perhelatan pilkada yang digelar di tengah pandemi sangat sulit diprediksi dapat menyedot partisipasi sesuai yang ditargetkan KPU 75,5%.

Namun target itu dapat tercapai berkat kerja sama semua pihak yaitu KPU, Bawaslu, Kemendagri, Pemda, termasuk TNI-Polri serta mampu meyakinkan keamanan dari Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

Meski demikian, ia mengatakan pilkada di 270 daerah ini perlu dievaluasi khususnya mengenai kualitasnya. DPR ingin memastikan kepala daerah yang terpilih punya legitimasi atau sesuai dengan kehendak rakyat. “Untuk itu usai reses kita akan melakukan evaluasi dengan KPU, Bawaslu dan pihak terkait,” jelas Arief pada liputan6.com, 29 Desember 2020.

Sebelumnya, survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat partisipasi warga dalam pilkada di saat pandemi Covid-19 lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sekitar 76% warga yang tinggal di daerah Pilkada ikut memilih pada 9 Desember 2020 atau lebih tinggi dari pilkada tanpa pandemi lima tahun lalu (69%).

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan survei nasional ini dilakukan dengan metode wawancara per telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak (random) pada 9-12 Desember 2020.

Margin of error survei diperkirakan +/-2.9%. Menurut Saidiman, partisipasi yang tinggi dalam pilkada ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya yang menunjukkan bahwa publik tetap ingin punya kepala daerah yang mereka pilih





secara langsung meski ada covid-19.

Angka partisipasi memilih Sulawesi Utara yang tertinggi di Indonesia pada 2020 tentu menjadi hasil tak terbayangkan dari seluruh kerja keras jajaran KPU daerah ini yang sempat mengalami penundaan proses Pilkada akibat pandemi.

Tak sampai situ, produk kepala daerah yang dihasilkan juga mencatat sejarah baru di Sulut; sebagai pemimpin yang dilegitimasi oleh rakyat dengan persentase pemilih terbesar dibanding Pilkada sebelumnya.

Selasa 21 Desember 2020 atau duabelas hari setelah pencoblosan, pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Sulawesi Utara sebagai peraup suara terbanyak dari seri suksesi Pilkada serentak se-Indonesia.

Ini merupakan kali kedua mereka meraih hasil yang sama, setelah juga pada 2015 pasangan tersebut merayakan kemenangan. Dengan total 821.503 suara, mereka unggul atas pasangan nomor urut 1, Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar yang mengumpulkan 491.457 suara dan Paslon nomor urut 2, Vonnice Anneke Panambunan-Hendry Corneles Mamengko Runtuwene, 125.627 suara

### **C. Capaian Menakjubkan di 15 Kabupaten/Kota**

Angka partisipasi tingkat provinsi sudah pasti linear dan sama menakjubkannya dengan hasil yang dicapai 11 kabupaten serta 4 kota di Sulawesi Utara. Beberapa di antaranya bahkan mencatat tingkat partisipasi pemilih terbesar di skala nasional.

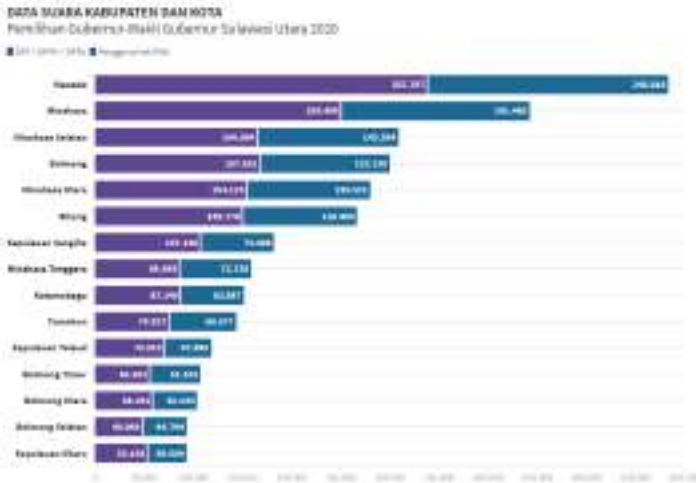


Lima kabupaten dengan partisipasi pemilih tertinggi, menurut Republika.co.id pada 17 Desember 2020 adalah Pegunungan Arfak Papua Barat 99,25%, Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 94,94%, Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 94,54%, Raja Ampat Papua Barat 93,67%, dan Dompu Nusa Tenggara Barat 93,53%.

Sedangkan kota dengan partisipasi tertinggi adalah Tomohon Sulawesi Utara 91,98%, Tidore Kepulauan Maluku 91,34%, Ternate Maluku Utara 83,82%, Sungai Penuh Jambi 82,81%, dan Blitar Jawa Timur 79,2%. “Sementara Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi daerah non penyelenggara atau hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, namun memberikan partisipasi hingga 85%,” sebut Ardiles Mewoh.

Kendati begitu, capaian terbilang tinggi di Mitra tersebut ternyata menurun bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya, berada pada 90,47 persen.

“Memang tingkat partisipasi menurun jika dibandingkan Pileg dan Pilpres, namun jika dilihat dari kondisi saat ini, hasil tersebut sangat memuaskan. Apalagi kami hanya menyelenggarakan Pilgub,” ungkap Ketua Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas KPU Mitra, Otniel Wawo di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Mitra pada Pilgub Sulut di Wale Wulan Lumintang 14 Desember 2020, seperti dilansir beritamanado.com.



**Table 5 : Model D.Hasil Provinsi-KWK / KPU Sulut 2020**

Bila dilihat per-kecamatan yang ada di Kabupaten Mitra, tingkat partisipasi pemilih tertinggi ada di Kecamatan Ratahan Timur dengan perolehan 89,73 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Tombatu 79,33 persen.

“Kami bersyukur karena rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada masalah yang berarti. Beberapa koreksi yang ada berkaitan dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTp), namun tidak mempengaruhi hasil,” cetus Otniel.

Plh Ketua KPU Mitra, Otnie Tamod menjelaskan, KPU Mitra telah menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam berbagai tahapan pemilihan.



“Sejak awal penerapan disiplin protokol kesehatan sudah dilakukan, di mana selain menyediakan tempat cuci tangan, harus menggunakan masker, diukur suhu tubuh, dan menggunakan sarung tangan, serta jumlah orang yang masuk ke ruangan dibatasi,” kata Otnie.

Sedangkan saat pleno, yang masuk ke ruangan hanya pihak yang berkepentingan dan dirinya bersyukur karena semua pihak mendukung penerapan protokol kesehatan, lebih khusus pihak kepolisian yang dengan setia terus mengawal tahapan Pilgub Sulut 2020.

“Bahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara bergantian, mereka yang belum mendapat giliran menunggu di luar ruangan. Demikian juga insan pers yang ingin mengambil gambar juga bergantian agar tidak terjadi kerumunan dalam ruangan rapat pleno terbuka,” tutur lelaki berlatar jurnalis ini.

Sedangkan Kabupaten Minahasa yang sejak masa para Tona’as dan Walian telah mempraktikkan demokrasi untuk menentukan pemimpin, turut mengalami peningkatan pada angka-angka pengguna hak pilih di Pilkada 2020.

Ketua KPU Minahasa Lord Malonda menyatakan, persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 ini ada pada angka 76,84 persen dan yang tidak memilih atau golput 23,16 persen.

Untuk angka terakhir disebabkan beberapa faktor, antara lain wajib pilih sedang berada di luar daerah, meninggal dunia sebelum pemungutan suara dan alasan lainnya.



Partisipasi pemilih 2020 lebih tinggi dibanding hajatan yang sama pada 2015 lalu yaitu sekitar 62 persen.

Malonda merinci jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilgub Sulut di Minahasa tahun 2020 ini yaitu 248.003 orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 190.556 orang.

“Secara pribadi maupun institusi KPU Minahasa, kami bersyukur Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut sudah sukses. Tingkat partisipasinya juga meningkat,” kata Malonda. Ke depan dia mengharapkan tingkat partisipasi pemilihnya akan lebih meningkat dari tahun 2020 ini, sehingga kualitas pesta demokrasi semakin baik.

KPU Minahasa Selatan juga sukses mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemilih pada ajang pesta demokrasi tersebut mencapai 86,9 persen.

“Pencapaian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan di Kabupaten Minahasa Selatan mencapai 86,97%. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa,” ujar Ketua Sosdiklih Palmas KPU Minsel Maya Sarijowan, seperti diberitakan Manadotoday.co.id 18 Januari 2021.



**Table 6 : Model D. Hasil Provinsi-KWK / KPU Sulut 2020**

Tingginya partisipasi pemilih di Pilkada 9 Desember 2020 yang melampaui target, mengindikasikan bahwa wajib pilih semakin sadar pentingnya memberikan hak politiknya dan penyelenggara Pemilu sukses melakukan sosialisasi.

“Karena itu terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilihan serentak tingkat PPK, PPS, dan jajaran Sekretariat, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS serta PPDP yang telah bersama-sama menyukseskan pemilihan serentak tahun 2020 ini,” ujar Maya.

Diketahui jumlah pemilih di Kabupaten Minsel pada Pilkada 2020 sebesar 160.908 yang menyalurkan hak politiknya di 513 TPS. Sementara jumlah suara berdasarkan



hasil rekapitulasi tingkat Gubernur-Wakil Gubernur, Paslon nomor urut 1 Christiany Eugenia Paruntu–Sehan Salim Landjar memperoleh 53.026 suara.

Paslon nomor urut 2 Vonny Aneke Panambunan–Henry Runtuwene 6.749 suara. Sedangkan calon nomor urut 3, Olly Dondokambey–Steven Kandow (OD-SK) meraup suara signifikan sebanyak 81.197.

Dari Tanah Totabuan, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mencatat rekor tertinggi partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tertinggi tingkat kabupaten di Sulawesi Utara (Sulut) meski digelar di tengah pandemi Covid-19. Komisioner KPU Boltim Terry F Suoth mengatakan, angka partisipasi pemilih di Pilkada Boltim 2020 mencapai 95,94 Persen atau naik 9,64 persen dari Pilkada sebelumnya pada 2015.

“Kalau kita berkaca dari perhelatan sebelumnya, Boltim itu punya tren peningkatan partisipasi yang luar biasa tingginya. Meskipun di situasi yang lumayan sulit di tengah pandemi ini, tapi tingkat partisipasi pemilih itu dapat hingga 95,94 persen,” ujar Terry yang juga Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat pada manado.tribunnews.com, Minggu 20 Desember 2020.

Catatan tersebut menjadi rekor tertinggi sejak kali pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati digelar di Boltim pada 2010 silam. Kabupaten pecahan Bolaang Mongondow ini terhitung telah tiga kali menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut, masing-masing pada 2010 digelar oleh KPU Bolmong, dan pada 2015 dan 2020 oleh



KPU Boltim.

Sementara untuk Sulut, Boltim menjadi yang tertinggi partisipasi pemilih, disusul Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) di posisi kedua dengan perolehan partisipasi pemilih 94,56 persen.

“Pertama kita melewati target partisipasi nasional, targetnya di angka 77,5 persen. Angka tersebut tertinggi se-Sulut dan kedua se-Indonesia untuk Pilkada serentak 2020,” jelasnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Boltim yang telah menyalurkan hak suara dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemilih Boltim yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember, meskipun memang situasi ini ada pada situasi sulit, tapi masyarakat masih antusias dalam memberikan hak pilihnya,” ucapnya.

Di balik angka-angka tersebut, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan angka partisipasi masyarakat ini menunjukkan pemilih Indonesia loyal dan kooperatif terhadap agenda elektoral. Kondisi pandemi Covid-19, kata dia, ternyata tak menghalangi pemilih untuk menyalurkan suara.

“Ini adalah modal demokrasi, sehingga kita jangan kemudian mundur ke belakang. Jangan sampai ke depan kontradiktif mengatakan masyarakat kita tidak cocok berpelembu sehingga pemilihan tidak langsung,” kata Titi.



# **BAB 5**

# **PENUTUP**







## PENUTUP

Saat Indonesia bahkan dunia di bawah bayang-bayang suram dampak Covid-19, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 9 Desember 2020 dilaksanakan.

Pemilihan langsung ini berjalan lancar, sukses, bahkan mengejutkan dari sisi ekspektasi tingkat partisipasi pemilih yang melambung di atas target tingkat partisipati nasional.

Mengapa Pilkada Sulut bisa berjalan sukses? Ada apa di balik kesuksesan tersebut?

Sebetulnya, banyak pihak meragukan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi yang melibatkan 1.864.883, pemilih ini. Alasannya cukup masuk akal. Sebab, di penghujung tahun sebelumnya, tepatnya 1 Desember 2019, ketika kasus pertama Covid-19 ditemukan oleh komunitas medis internasional di Wuhan, hari-hari berikutnya, tak ada isu yang bisa menandingi kehebohan wabah ini. Angka pasien dengan gejala terinfeksi virus SARS-Cov-2 dengan cepat meningkat di seluruh dunia.

Banyak negara menerapkan kebijakan karantina dan lockdown. Bencana non alam ini dengan sekejab tak hanya memukul perekonomian dunia, namun seluruh aktivitas



manusia jadi terhambat. Dan Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi rakyatnya dari wabah.

Bayangan keraguan itu juga tergambar pada target tingkat partisipasi pemilih secara nasional yang hanya ditetapkan sebesar 77,5 persen. Artinya ada 23 persen lebih pemilih diprediksi tidak akan datang ke bilik pemugutan suara. Lalu, memasuki tahun 2020, ketika eskalasi politik lokal di Sulut kian meningkat KPU RI secara resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020 dengan alasan kemanusiaan yaitu keselamatan nyawa manusia menjadi patokan dasar dalam mengambil kebijakan. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya.

Pertama, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi faktual syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Empat tahapan ini semestinya dilakukan pada Maret hingga Mei 2020.

Tiga bulan kemudian, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan



Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru kembali sepakat.

Tahapan Pilkada 2020 mulai dijalankan kembali pada 15 Juni. Pemungutan suara ditetapkan dihelat pada 9 Desember 2020. Salah satu hal yang disepakati adalah seluruh rangkaian tahapan Pilkada itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus corona yang ketat. KPU harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

Namun perasaan ketar-ketir belum juga usai. Mengundang jutaan pemilih ke bilik suara bukan perkara mudah bagi pihak KPU sebagai Penyelenggara. Mengawasi jutaan pemilih sebelum bahkan saat pencoblosan bukan persoalan gampang bagi Badan Pengawas.

Bagaimana pemilih mau datang ke bilik suara sementara kerumunan telah menjadi drama paling menakutkan semua orang mengingat pola penyebaran wabah lebih banyak disebabkan oleh interaksi langsung antara manusia. Sementara di luar sana, suara pro kontra pelaksanaan Pilkada masih mendengung keras.

Namun yang mengejutkan, saat Pilkada Sulut dihelat pada 9 Desember 2020, tingkat partisipasi pemilih ternyata mencapai 78,42 persen. Tingkat partisipasi pemilih itu tercatat sebagai rekor tertinggi pertama dari sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur (pilgub) di Indonesia. Bahkan, capaian Pilkada era Pandemi Covid-19 ini melampaui target tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5 persen.

Sementara di waktu yang sama, pada Pilkada Kabupaten Kota, tiga daerah di Sulut masuk peringkat tertinggi di



Indonesia yaitu Kota Tomohon peringkat pertama dengan partisipasi pemilih sebesar 91,5 persen. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 92.8 persen. Bolaang Mongondow Selatan, (Bolsel) 93,2 persen.

Capaian prestasi Pilkada ini jelas tidak terjadi begitu saja. Apalagi pelaksanaannya di tengah situasi pandemi. Setidaknya ada tiga pemicu utama keberhasilan Pilkada Sulut ini yaitu: Pertama, ada latar historis dan budaya yang mendasari sikap masyarakat dalam memandang momentum demokrasi. Kedua, kinerja pihak penyelenggara Pilkada yang berhasil menggiring pemilih ke bilik suara. Ketiga, adanya kesadaran masyarakat terhadap urgensi sebuah momentum pemilihan kepala daerah.

Dari sisi historis kultural, di Minahasa, Sangihe Talaud dan Bolaang Mangondow, jejak kehadiran rakyat dalam system pemerintahan masa lampau sudah tertanam kuat dalam benak masyarakatnya. Jauh sebelum kemerdekaan, Minahasa Raad adalah Dewan Rakyat pertama di Indonesia.

Di sana berlangsung sejumlah sidang yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi modern yang menjembatani kesenjangan antara fitrah manusia dan cengkeraman otoritarianisme. Di sana diputuskan sejumlah kontrak sosial, perlindungan hak warga negara, dan mengatur terselenggaranya kedaulatan rakyat melalui hak suara.

Di Minahasa praktik demokrasi juga terlihat pada Pemilihan Ukung tu'a (kepala desa) yang dilaksanakan dalam pranata demokratis. Lebih luas lagi, kita akan dipertemukan dengan forum tertinggi dalam struktur



masyarakat Minahasa tempo dulu yang disebut Dewan Wali Pakasaan yang kemudian menjelma menjadi Minahasa Raad di masa penjajahan Belanda.

Bahkan Minahasa, dengan karakteristik unik demokrasi yang diperkaya kemelekan huruf penduduknya telah menjadi pilot project Pemilihan Umum pertama tahun 1951 selain Yogyakarta. Saat berlangsung pungutan suara untuk pemilihan 25 anggota dewan itu pada 14 Juni 1951, sebanyak 150.000 pemilih menggunakan hak pilihnya atau 73 persen penduduk yang berhak memilih memberikan suara.

Di Sangihe, kehadiran rakyat dalam sistem pemerintahan sudah berjejak dari masa yang juga cukup jauh. Keterlibatan suara rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan telah berlaku sejak masa kerajaan-kerajaan di Sangihe Talaud yang bermula pada abad ke-15.

Di negeri kepulauan itu keberadaan Lembaga Dewan Adat seperti Komolang Bobatong Datu (Majelis Petinggi Kerajaan), serta tradisi pemilihan langsung “Kapitalau” (Kepala Desa) dalam system Pemerintahan Kampung telah menjadi akar pada kultur demokrasi dalam lingkup paling bawah.

Bila demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang membuka ruang kesetaraan rakyat dalam pengambilan keputusan, maka di Sangihe Talaud di era para raja telah tersedia ruang dialogia antara rakyat dan raja, bahkan terbukanya ruang kritik atas kekuasaan baik lewat lembaga Dewan Adat maupun secara personal.

Di Bolaang Mongondow, dari tahun 1303, penduduk negeri para Bogani tersebut telah hidup dalam hakekat



kesadaran demokrasi. Suara rakyat di representasikan lewat para Bogani. Posisi para Bogani saat mengambil keputusan dilakukan lewat kan forum permusyawaratan.

Sementara apabila desa dipandang sebagai embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan berbasis demokrasi, maka secara tradisonal Di Bolaang Mangondow, kehadiran para “Sangadi” sebagai Kepala Desa yang aktivitas pemilihannya dipilih langsung oleh penduduk desa merupakan benih demokrasi dari rengkah sejarah negeri itu.

Dari sisi kinerja Komite Pemilihan Umum (KPU) Sulut, pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, tak lain merupakan ujian berat bagi mereka. Risiko terbesar adalah ketakutan pemilih untuk datang ke lokasi-lokasi tempat pemungutan suara. Pandemi tahun 2020 telah menciptakan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.

Ini dimungkinkan karena Covid-19 merupakan wabah asing dan masih diraba-raba pola penyebarannya, sehingga memicu banyak pendapat meminta Pilkada kali ini ditunda saja hingga situasi normal. Risiko terburuk pasca-Pilkada adalah terciptanya cluster baru gara-gara kumpulan ratusan pemilih di satu titik.

Lantas apa cara KPU hingga mereka berhasil menyelenggarakan pemilihan langsung era pandemi ini? Secara taktis KPU Sulut meredam ketakutan masyarakat dengan cara yang terhitung dan terukur, di antaranya penegakkan Protap penanggulangan Covid-19. Tidak hanya pemilih, kelompok penyelenggara lapangan juga diamankan demi mewujudkan Pilkada sehat.

Ada ribuan petugas KPPS sudah jalani rapid. Jika reaktif,





apalagi positif, mereka tentu tak bisa bertugas. Protokol kesehatan wajib ini dijalankan mengacu Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid. Pola kampanye dilakukan secara terbatas. Debat publik disiarkan lewat televisi dan media sosial.

Berbagai platform media massa dikerahkan untuk mengedukasi masyarakat agar agar mereka datang mencoblos. Pilkada Sulawesi Utara 2020 pun sukses dilaksanakan, kendati bergulir di tengah pandemi.

Bagi KPU Sulut, tentunya hal tersebut menjadi capaian yang melegakan, tetapi juga menggembirakan. Kekhawatiran bahwa pemilih akan menyusut akibat terpaan Covid-19 ternyata tak terbukti. Faktanya, ada 1.462.605 rakyat Sulawesi Utara datang ke TPS menyalurkan hak suara mereka.

Dari sisi kesadaran masyarakat akan urgensi sebuah Pilkada yaitu momentum tersebut dipandang bisa mendukung cita-cita ideal mereka seperti memunculnya identitas lokal, serta meningkatnya pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Ada harapan di hati masyarakat di mana pilkada di era otonomi daerah akan melahirkan figur pemimpin yang berasal dari daerah yang akan dipimpinya, mengenal kondisi daerahnya, dan punya keterkaitan emosional nan erat dengan masyarakat.

Karena di Sulawesi Utara sejak dari masa yang jauh, masyarakat melihat momentum demokrasi seperti Pilkada saat ini sejatinya adalah terciptanya sistem Pemerintahan Daerah yang ideal. Keidealan itu harusnya didukung oleh



adanya Sumber Daya Manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas.

Karena meski instrumen peraturan telah dibuat sebaik mungkin dalam penciptaan sistem Pemerintahan Daerah yang ideal, bila aparatur pelaksanaannya dan pengawasnya tidak berintegritas, maka akan sulit tertepiskan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebuah harapan terbetik di sana, di mana pergantian kepala daerah lewat pilkada secara langsung akan menjadi kesempatan bagi daerah dalam mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi daerah melalui kewenangan yang ada pada daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Algemeen Indisch Dagblad edisi 18 Mei 1951.
- Denni H.R Pinontoan, Pemilu di Minahasa tahun 1951, Pemilihan Langsung Pertama di Indonesia, katanisme.blogspot.com
- Sejarah Bolaang Mongondow', Kotamobagu, Maret, 2003.
- Kaghoo Max S, Jejak Leluhur, Warisan Budaya di Pulau Siau, PT. Kanisius 2016.
- Tinungki Iverdixon, Nusa Utara, Dari Masa Purba Hingga Era Kerajaan, PT. Barta Sulut Mandiri, 2020.
- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS,
- JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 2, Nomor 1, Desember 2016
- Compton, Boyd R. Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia, PT Pustaka LP3ES. 1993
- Ferry Daud M. Liando, Otonomi Daerah Terbelenggu Pilkada, aipi-politik.org
- Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS
- Demokrasi di tingkat lokal - International IDEA
- Electoral.id
- klik24.id
- sulut.kpu.go.id
- kpu-minahasakab.go.id
- Tempo.co



- Kompas Pedia, Antonius Purwanto, November 2020
- *Tribunews.com*
- *Beritamanado.com*
- *CNNIndonesia.com*
- *Bisnis.com*
- *kompas.com*
- *cnnindonesia.com*
- *Liputan6.com*
- *beritakawanua.com*
- *Manadopost.id*
- *rri.co.id*
- *satubmr*
- *katadata.co.id*
- *Suara.com*
- *detik.com*
- *Republika.co.id*
- *Manadotoday.co.id*

#### Wawancara:

- Denni H.R. Pinontoan, Pemilu 1951 di Minahasa.
- Max Surdirno Kagho, Proses Pemilihan Bobatong Datu di Sangihe Talaud.
- Jupiter Makasangkil, Pemilihan Kapitalau di Sangihe Talaud
- Jan Rafles Takasihaeng, Pemilihan Kapitalau di Sangihe Talaud



## Tentang Penulis



### YOSEPH E. IKANUBUN

Seorang jurnalis yang bekerja untuk Harian METRO Manado sejak tahun 2006. Lulusan Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Manado (Unima) tahun 2003. Mulai terjun di industri media sejak tahun 2004, saat bergabung dengan Harian KOMENTAR Manado sebagai reporter.

Dua tahun kemudian, menjadi redaktur di Harian METRO hingga saat ini. Selain itu, mantan Ketua Presidium DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Tondano ini juga pernah menulis lepas dan menjadi kontributor untuk sejumlah media nasional.

Seperti Tabloid BOLA dan Tabloid Gema Olahraga, Majalah Hidup, dan Majalah GATRA, serta Ekuatorial.com. Kini dia juga menjadi kontributor untuk Liputan6.com.

Bergabung bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado di tahun 2007, dan pernah menjabat Ketua AJI Manado selama 2 periode di tahun 2012 – 2015 dan 2015 – 2018. Mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) jenjang wartawan madya, angkatan pertama AJI Indonesia tahun



2012 di Depok, Jawa Barat. Saat ini selain dipercayakan sebagai Ketua Majelis Etik AJI Manado, juga sebagai penguji UKJ AJI Indonesia, dan Ahli Pers dari Dewan Pers.

Sejumlah buku yang sudah dihasilkan adalah: Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2016 (ditulis bersama sejumlah jurnalis dan akademisi dari 24 provinsi di Indonesia); Bayang-Bayang Degradasi (kumpulan karya jurnalistik isu lingkungan bersama 13 jurnalis anggota AJI tahun 2017); Berkah Aqua bagi Warga Minahasa Utara (ditulis bersama Youdy Taroreh tahun 2018); Indonesia Rumah Kita, Kisah-kisah Toleransi dan Merawat Keberagaman dari Aceh Hingga Papua (kumpulan karya jurnalistik contributor liputan6.com tahun 2018).

Tahun 2018 menerbitkan buku dengan judul Jurnalisme Melintasi Zaman, kumpulan karya jurnalistik bidang agama, budaya, dan sejarah.



### IVERDIXON TINUNGKI

Bekerja sebagai Jurnalis sejak 1988. Jadi koresponden media nasional, redak-tur, Wapemred dan Pemred di beberapa koran harian di Manado. Menjadi pendiri Sanggar Kreatif Manado, menulis puisi, drama, cerpen, novel, naskah dan menyutradarai teater. Penerima Anugerah Puisi tahun 2013 lewat Buku Kumpulan Puisi “KLIKITONG” sebagai Buku Pilihan pada Sayembara Buku Puisi Indonesia. Penerima Anugerah Puisi tahun 2014 lewat Buku Kumpulan Puisi “MAKATARA” sebagai Buku Pilihan pada Sayembara Buku Puisi Indonesia.

Puisi dan esainya pernah dimuat di antaranya: Majalah Sastra Horison, Harian Sinar Harapan, Harian Indopos dan berbagai media yang terbit di Indonesia. Sejumlah puisinya juga terangkum dalam Antologi: Mimbar Penyair Abad 21, Balai Pustaka 1996.

Beberapa buku antologi puisi karyanya, Orang Gila Dari Edgar (2019), Malam Terakhir Pilatus (2017), Manado Mooi (2017), Jalur Rempah (2016), Longuseiku (2016), Moraya, Sepilihan Puisi Berlatar Minahasa (2014), Aku Laut Aku Ombak (2009), Di Tangan Angin (2009). Novel antara lain



“Kepas” (2013) serta “Dari Ramensa ke Manongga, Kumpulan Cerita Rakyat Talaud” (2016).

Karya-karya nonfiksi di antaranya “Sang Petarung Dari Perbatasan, Authorized Biography” (2019), “Delik Nedosa, Sebuah Kajian Hukum Adat Sangihe” (2002) dan “Nazaret, Sejarah Gereja” (2013). Pada 2018 menerbitkan buku “Nusa Utara, Masa Purba Hingga Era Kerajaan – Sebuah Reportase Sejarah Budaya”. Saat ini aktif menulis berbagai artikel pada media online yang dia dirikan, Barta1.com.





### ADY PUTONG

Memulai karier jurnalis di Koran Harian Global News pada 2003 di Manado. Tahun 2006 sebagai redaktur pelaksana di Surat Kabar Harian Swara Kita Manado. Pada 2010 bergabung di redaksi media online BeritaManado.com dan sejak 2015 hingga saat ini berkontribusi menulis berita untuk Majalah Gatra dan online Gatra.com.

Tahun 2017 menjadi salah satu penulis dalam buku antologi lingkungan “Bayang-Bayang Degradasi” bersama 13 jurnalis AJI Manado. Pada 2020 menulis buku “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara”, yang diangkat dari perspektif budaya lokal.

Pada 2018 ikut mendirikan Barta1.com di Manado, dan saat ini sebagai koordinator liputan di media online tersebut. Suami dari Marlin Edam, dan papa dari Mozart dan Maura ini menjadikan keluarga kecilnya sebagai sumber inspirasi dari semua tulisannya.



## SUPARDI BADO

Mengawali karir jurnalistik di tahun 2007 sebagai kameramen RCTI. Tahun 2009, kemudian diangkat menjadi Kontribu-tor RCTI Sulawesi Utara. Alumni Fisip Unsrat Manado ini kemudian menjadi Pemimpin Redaksi koran harian lokal Media Totabuan di Tahun 2011.

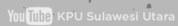


Enam tahun di media cetak, Dia kemudian beralih mendirikan media siber [satubmr.com](http://satubmr.com) dan [sulawesi.com](http://sulawesi.com). Saat ini, Supardi dipercayakan sebagai Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Utara.

----- ~ ~ -----



Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas,  
Wenang, Mahakeret Timur, Kec. Wenang,  
Kota Manado, Sulawesi Utara 95112



[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

ISBN 978-623-6183-16-8

